

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

Assalammualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2025 "*Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif*" dan Visi Kemendikbud tahun 2014 "*Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif*", PPPPTK Penjas dan BK tahun 2010-2014 telah mengembangkan berbagai program dan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, program-program dimaksud didesain dalam kawasan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pengembangan bimbingan konseling yang didukung dengan penguatan teknologi pembelajaran.

Salah satu upaya PPPPTK Penjas dan BK merealisasikan program peningkatan kompetensi pendidik di bidang bimbingan konseling adalah menyelenggarakan diklat fungsional bagi guru bimbingan konseling. Guna mendukung pencapaian kompetensi diklat tersebut, dikembangkan bahan pembelajaran dalam bentuk modul yang akan digunakan oleh para guru bimbingan konseling dalam mengikuti program diklat dimaksud.

Sebagaimana peruntukannya, bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk modul dimaksud agar dapat dipelajari secara mandiri oleh para peserta diklat. Beberapa karakteristik yang khas dari bahan pembelajaran tersebut, yaitu: (1) lengkap (*self-contained*), artinya, seluruh materi yang diperlukan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar tersedia secara memadai; (2) dapat menjelaskan dirinya sendiri (*self-explanatory*), maksudnya, penjelasan dalam paket bahan pembelajaran memungkinkan peserta diklat untuk dapat mempelajari dan menguasai

kompetensi secara mandiri; serta (3) mampu membelajarkan peserta diklat (*self-instructional material*), yakni sajian dalam paket bahan pembelajaran ditata sedemikian rupa sehingga dapat memicu peserta diklat untuk secara aktif melakukan interaksi belajar, bahkan menilai sendiri kemampuan belajar yang dicapainya.

Diharapkan dengan tersusunnya bahan pembelajaran ini dapat dijadikan referensi bagi guru bimbingan konseling pada umumnya dalam memberikan layanan konseling pada peserta didik, dan khususnya bagi guru bimbingan konseling yang mengikuti program diklat di PPPPTK Penjas dan BK.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun, baik para penulis, tim IT, pengetik, tim editor, maupun tim penilai yang telah mencurahkan pemikiran, meluangkan waktu untuk bekerja keras secara kolaboratif dalam mewujudkan bahan ajar diklat ini.

Semoga apa yang telah kita hasilkan memiliki makna strategis dan mampu memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terutama dalam bidang bimbingan konseling, yang akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala,

Dr. Saroni, M.Ed.

NIP.195212191990031001

DAFTAR ISI

	hal
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	5
C. Tujuan Pembelajaran	5
1. Kompetensi dasar	5
2. Indikator Keberhasilan	5
3. Peta Kompetensi	6
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	6
E. Petunjuk Penggunaan Modul	7
BAB II ILMU PENDIDIKAN DAN LANDASAN KEILMUAN	8
A. Indikator Keberhasilan	8
B. Uraian Materi	8
1. Teori Pendidikan	8
2. Makna Pendidikan	11
3. <i>Hakekat Pendidikan</i>	24
4. Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling	37
5. Landasan Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling	43
C. Latihan	53
D. Rangkuman	54
E. Evaluasi	55
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	57

BAB III	PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN DAN PROSES	
	PEMBELAJARAN DALAM BIMBINGAN DAN	
	KONSELING	58
	A. Indikator Keberhasilan	58
	B. Uraian Materi	58
	1. Prinsip-prinsip Pendidikan dalam BK	58
	2. Proses Pembelajaran dalam Bimbingan dan	
	Konseling	66
	C. Latihan	74
	D. Rangkuman	74
	E. Evaluasi	76
	F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	78
BAB IV	PENUTUP	79
	A. Evaluasi Kegiatan Belajar	79
	B. Umpan Balik	79
	KUNCI JAWABAN	80
	DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksitas masyarakat global yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang begitu pesat memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan. Pada satu sisi pendidikan tidak mungkin memberikan segalanya, sedangkan di sisi lain pendidikan tidak hanya mengembangkan nilai-nilai instrinsik tetapi juga nilai-nilai instrumental dan *transcendental*. Salah satu implikasi pelaksanaan pendidikan adalah bahwa proses pembelajaran harus juga memberi tempat kepada proses *inside-out*, yaitu suatu proses pemberdayaan diri sendiri, mulai dari diri sendiri, atas dasar paradigma, karakter dan motif sendiri. Sementara implikasi lain dari pelaksanaan pendidikan juga menuntut adanya keserasian pribadi-lingkungan menjadi dinamika sentral dari keberfungsian individu di dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam transaksi individu dengan lingkungan terjadi proses perkembangan, perubahan, perbaikan, dan penyesuaian perilaku yang terarah kepada pengembangan kemampuan mengendalikan proses sistem yang cukup kompleks. Kemampuan dan kesiapan individu untuk melakukan pengarahan diri (*self-direction*), pengaturan diri (*self-regulation*), dan pembaharuan diri (*self-renewal*), adalah perilaku yang harus dikembangkan melalui pendidikan untuk memelihara keserasian pribadi-lingkungan secara dinamis.

Hal penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan diharapkan melahirkan sosok manusia sebagai mana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yaitu pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini karena SDM mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Mutu sumberdaya manusia akan menjadi modal dasar bagi daya saing bangsa terutama di era masyarakat berpengetahuan. Peningkatan mutu sumberdaya manusia hanya dapat dilakukan melalui pendidikan yang bermutu.

Uraian di atas mensyaratkan perlunya pencarian makna dan hakikat pendidikan sebagai dasar pijakan dalam pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Fenomena atau kebutuhan *search for meaning* ini akan menjadi warna lain pelaksanaan pendidikan dalam kehidupan global. Dikatakan oleh Frankl (1985) bahwa pencarian makna pada diri manusia merupakan motivasi primer di dalam kehidupannya dan bukan rasionalisasi sekunder dari dorongan instintif. Makna ini unik dan spesifik yang harus dan hanya bisa dipenuhi oleh diri dirinya sendiri; dan terjadi dalam semua kehidupan (Zohar & Marshall,2000) termasuk kehidupan pendidik yang professional dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan secara kontekstual dan utuh, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan persoalan bangsa adalah sangat diperlukan pada saat ini dalam konteks pembangunan nasional.

Pendidikan adalah suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat. Konsekuensinya adalah proses pendidikan itu harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusia. Terkandung makna disini bahwa melalui proses pendidikan diharapkan manusia berkembang ke arah bagaimana dia harus menjadi dan berada. Jika pendidikan ini dipandang sebagai suatu upaya untuk membantu manusia menjadi apa yang bisa diperbuat dan bagaimana dia harus menjadi dan berada, maka pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidik perlu memahami manusia dalam segala hal aktualisasinya, kemungkinannya, dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi pada diri manusia.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, asilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, erta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan. Khusus terkait dengan profesi konselor tugas dan fungsi seorang konselor adalah melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. adapun dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling Crow & Crow, (1960) menyatakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah menyediakan unsur-unsur di luar individu yang dapat dipergunakan untuk memperkembangkan diri. Mengacu pada pernyataan tersebut, dalam arti luas bimbingan dan konseling dapat dianggap sebagai bentuk upaya pendidikan, dalamarti sempit bimbingan dan konseling sebagai teknik yang memungkinkan individu dapat menolong diri sendiri.

Secara fungsional, konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan

lingkungan. Konseling merupakan proses yang menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, karena itu program-program konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, dan hasil konseling menunjang keberhasilan pendidikan umumnya. Oleh karena itu Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor untuk dapat menjalankan tugas profesionalnya harus didukung oleh dasar keilmuan pendidikan.

Dasar Keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional konseling dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi konseling. Konselor diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesional dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor termasuk ke dalam kualifikasi pendidik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6 "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, KONSELOR, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Melalui keilmuan inilah konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan memahami seluk beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik (dalam hal ini klien) melalui modus pelayanan konseling. Dalam hal ini proses pelayanan konseling tidak lain adalah proses pembelajaran yang dijalani oleh sasaran layanan (klien) bersama konselornya. Oleh karenanya, konselor sebagai pendidik diberi label juga sebagai agen pembelajaran.

B. Deskripsi Singkat

Modul mata pelajaran Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling membahas Ilmu Pendidikan dan Landasan keilmuan yang meliputi teori pendidikan, makna pendidikan dalam BK, hakikat pendidikan, pendidikan dan bimbingan, landasan pendidikan dalam BK; Prinsip-prinsip Pendidikan dan Proses Pembelajaran, yang meliputi prinsip-prinsip pendidikan dalam BK, proses pembelajaran dalam BK.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

- a. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya.
- b. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran.
- c. Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan

2. Indikator Keberhasilan

- a. Mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling.
- b. Mengaplikasikan landasan keilmuan pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
- c. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling.
- d. Mengimplementasikan proses pembelajaran dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling.
- e. Mengaplikasikan landasan budaya dalam praksis pendidikan dalam layanan bimbingan dan konseling.

3. Peta Kompetensi

Menguasai esensi Teori dan Praksis Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling merupakan kompetensi dasar dari kompetensi menguasai Ilmu Pendidikan dan Landasan keilmuan, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, dan menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan. Kompetensi ini merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Ilmu Pendidikan dan Landasan Keilmuan
 - a. Teori Pendidikan
 - b. Makna Pendidikan
 - c. Hakikat Pendidikan
 - d. Pendidikan dan Bimbingan Konseling
 - e. Landasan Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling

2. Prinsip-Prinsip Pendidikan dan Proses Pembelajaran
 - a. Prinsip-prinsip Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling
 - b. Proses Pembelajaran dan Bimbingan dan Konseling

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari empat bab. Untuk dapat memahami secara utuh isi modul ini dibaca dengan runtut. Bab I sebagai dasar pemahaman semua bab, Bab II membahas mengenai pendidikan dan landasan keilmuan, Bab III membahas mengenai prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran dan Bab IV berisi evaluasi kegiatan, umpan balik dan tindak lanjut. Bacalah secara cermat dan teliti dari bab I sampai Bab III dan tuliskan hal-hal yang dianggap penting dalam buku catatan dan diskusikan dengan teman-teman sehingga memperoleh kejelasan tentang isi/materi secara keseluruhan dari modul ini. Tanyakan kepada diri sendiri apakah yang ditulis dalam modul ini sudah dapat dikuasai dan diimplementasikan dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga dapat mewujudkan kemartabatan profesi konselor.

BAB II

ILMU PENDIDIKAN DAN LANDASAN KEILMUAN

A. Indikator Keberhasilan

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat:

1. Mengaplikasikan teori pendidikan dalam bimbingan dan konseling
2. Mengaplikasikan makna pendidikan dalam bimbingan dan konseling
3. Mendeskripsikan hakikat pendidikan dalam bimbingan dan konseling
4. Mendeskripsikan pendidikan dan bimbingan konseling
5. Mengaplikasikan landasan pendidikan dalam bimbingan dan konseling

B. Uraian Materi

1. Teori Pendidikan

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktik. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan, sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkretnya (nyatanya). Praksis pendidikan adalah bidang kehidupan dan kegiatan praktis pendidikan. Kedua jenis seyogyanya tidak dipisahkan, sebaiknya siapa yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perlu menguasai keduanya. Teori mengandaikan praktek dan praktek berlandaskan teori. Oleh karena itu, dipandang janggal bila ada orang yang mengatakan dapat melaksanakan pendidikan tanpa menguasai teorinya.

Teori pendidikan perlu memiliki syarat-syarat, seperti logis, deskriptif, dan menjelaskan. Logis artinya memenuhi syarat-syarat untuk berpikir lurus dan benar, deskriptif atau penggambaran berarti dipaparkan secara jelas,

sedangkan menjelaskan berarti memberikan penerangan. Teori pendidikan tidak dapat disusun seperti teori dalam ilmu pengetahuan alam. Teori pendidikan disusun sebagai latar belakang yang hakiki dan sebagai rasional dari praktek pendidikan serta pada dasarnya bersifat direktif. Disusun demikian rupa dengan maksud untuk menemukan sejumlah penemuan dalam praktek. Fungsi teori pendidikan menunjukkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan sehingga disebut direktif.

Istilah direktif tersebut memberikan makna bahwa pendidikan itu mengarah pada tujuan yang hakikatnya adalah terwujudnya perkembangan optimal, kesejahteraan dan kebahagiaan peserta didik. Disini perlu dicatat tentang keterlibatan norma dan nilai dalam penyusunan teori pendidikan. Oleh karena itu pendidikan itu mempunyai obyek materi manusia, maka nilai-nilai yang berkenaan dengan kemanusiaan menjadi muatan dalam teori pendidikan. Dengan berpegang pada proposisi bahwa pendidikan itu adalah pelaksanaan dari filsafat antropologi maka beberapa pengertian dasar (*anthropological constants*) perlu diperhitungkan dalam penyusunan teori.

Pengertian dasar tentang manusia, seperti materialistis, spiritual, historisitas, sosialitas, etis, dan religius memuat nilai-nilai tertentu. Dalam hal peranan pendidikan terhadap pengembangan materialistis-spiritual adalah terbentuknya aku, dalam hal historis adalah pertumbuhan dan perkembangan individu secara kontinyu dengan memperhatikan latar belakang, keadaan sekarang, dan yang akan datang. Pengertian dasar etis sudah jelas, terbentuknya keterkaitan struktur kejiwaan individu serta tata pergaulan dengan nilai-nilai kesusilaan agar dapat dicapai ketenteraman dan ketenangan dan hal ini menjadi lebih tinggi bila menunjuk kepada religius. Manusia berhadapan dan berhubungan dengan penciptanya: Tuhan seru sekalian alam.

Keterlibatan norma dan nilai dalam pendidikan adalah bahwa teori pendidikan mempunyai muatan tanggungjawab moral dari pihak pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, Pasal 1 butir (6)). Disamping itu, dalam hal tindakan pendidikan, teori pendidikan perlu menggunakan referensi hubungan pribadi dengan pribadi.

Peserta didik (anak) sebagai sasaran pendidikan adalah subyek pendidikan. Peserta didik adalah makhluk yang mempunyai pribadi, bebas, yang dalam berbagai hal mampu menentukan pilihannya sendiri. Oleh karena itu, suatu teori pendidikan dalam merumuskan prediksi atau ramalannya berbeda dengan rumusan dalam teori ilmu pengetahuan alam. Jika rumusan teori ilmu pengetahuan alam dapat secara eksak atau dikatakan pasti, dalam teori pendidikan rumusan itu memperhitungkan adanya kebebasan pada makhluk, yaitu manusia itu sendiri. Setidaknya juga sebagai makhluk yang berusaha menemukan kebebasan dirinya.

Namun, teori pendidikan tetap memiliki kualitas direktif atau prediksi sekalipun, hal ini melekat pada sifat pembawaan pendidikan sebagai karya manusia yang normatif. Jika pendidikan menghendaki supaya anak (peserta didik) mengembangkan tingkah laku tertentu dalam pergaulan bukanlah tingkah laku yang anak kehendaki semata, melainkan yang dapat diterima dalam kaitan norma tertentu. Misalnya, bersikap sopan terhadap orang lain, baik teman sendiri atau gurunya. Selain menggunakan bahasa yang sopan juga disertai dengan rona muka yang cerah serta dengan membungkukkan badan seperlunya.

Pendidikan memandang manusia sebagai obyek dan subyek. Dikatakan obyek karena manusia itu menjadi sasaran pendidikan, terutama dalam hal kapasitasnya sebagai makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, ciri dari sifat pertumbuhan dan perkembangan itu menjadi perhatian pendidikan untuk dipengaruhi dan diarahkan. Pendidikan memperhatikan manusia sebagai subyek karena dengan potensinya manusia mempunyai daya untuk mengembangkan diri yang seterusnya menjadi makhluk yang berkepribadian dan berwatak. Sementara tokoh pendidikan, seperti M.J. Langeveld mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang membentuk diri pribadi.

2. Makna Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosionalnya, sosialnya, dan etikanya. Dengan kata lain pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu secara umum dan sangat mendasar. Driyarkara (1980) mengatakan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ke taraf insani itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik. Pendidikan dipandang sebagai komunikasi keberadaan (eksistensi) manusiawi yang otentik kepada manusia muda, agar dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan. Komunikasi ini terlaksana dalam kesatuan antar pribadi antara pendidik dan anak didik.

Pendidikan adalah upaya normatif yang membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya. Kemana manusia mau dibawa melalui upaya pendidikan? Jawabannya harus ditemukan melalui dan bermuara kepada pemahaman tentang hakikat manusia. Hakikat manusia tidak akan terlepas dari pertanyaan-pertanyaan

antropomorfik karena pandangan manusia terhadap dunia dan dirinya tidak bisa lepas dari sudut pandang eksistensial manusia itu sendiri. Pertanyaan yang berkenaan dengan "Siapa saya?", "Apa dunia ini?", "Apa yang harus saya perbuat?", "Apa yang dapat saya harapkan?" merupakan pertanyaan di sekitar upaya memahami hakikat manusia. Berbagai pandangan dan tafsiran telah mencoba berupaya menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Harold H. Titus (1959:141-145) menggolongkan tiga aliran penafsiran terhadap hakikat manusia. Ketiga golongan itu ialah tafsiran klasik atau rasionalistik, tafsiran teologis, dan tafsiran ilmiah.

Tafsiran klasik atau rasionalistik, yang bersumber pada filsafat Yunani dan Romawi, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, dan Kant memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pandangan Socrates maupun Plato, manusia yang cerdas itu adalah manusia yang berbudi atau manusia yang saleh; ("*...the intelligent man is the virtuous man*") (Titus, 1959:142). Demikian pula Aristoteles memiliki pandangan yang sama dengan Plato bahwa: "*...the reason (nous) is man's true self and indestructible essence.*" (Comford, 1945:342). Kulminasi pandangan klasik ini terletak pada filsafat Kant yang juga memandang manusia sebagai makhluk rasional (Fromm; Xirau, 1968:4-5). Kant mengakui bahwa dengan kemampuan rasio, manusia memperoleh pengalaman dan pengetahuan tetapi pengalaman dan pengetahuan itu tidak dapat dijadikan dasar keyakinan yang absolut bagimanusia. Jadi menurut pandangan klasik (rasionalistik) manusia itu difahami terutama dari segi hakikat dan keunikan pikirannya. Pandangan ini merupakan pandangan optimistik, terutama mengenai keyakinan akan kemampuan pikiran manusia.

Tafsiran teologis, memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan dibuat menurut aturan Tuhan. Manusia hanya akan menemukan dirinya apabila dia mampu mentransendensikan kehidupan yang alami kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu Tuhan. Manusia adalah makhluk

yang memiliki kemungkinan untuk berbuat baik atau jahat, dia memiliki kelemahan dan keunggulan. Kelemahan manusia dapat membawa dirinya terperosok ke dalam tataran kehidupan yang paling rendah (tingkat kehidupan hewani), tapi dengan kekuatannya pula manusia dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Dalam tafsiran teologis perkembangan manusia terarah kepada upaya menemukan nilai kehidupan instrinsik dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Tafsiran teologis ini bersumber dari ajaran agama (tertentu), sehingga dimungkinkan pula keragaman pandangan tentang hakikat manusia meskipun ada hal-hal yang bersifat universal.

Tafsiran ilmiah tentang manusia bervariasi, bergantung kepada sudut pandang ilmu yang digunakan. Ilmu-ilmu fisis memandang manusia sebagai bagian dari keteraturan alam filsafat, oleh karena itu manusia harus dipahami dari segi hukum-hukum fisis dan kimiawi (Titus, 1959:143). Studi dan tafsiran ilmiah tentang manusia ini pertama kali dilakukan oleh Freud (Fromm; Xirau, 1968:5), yang menerapkan hukum-hukum fisika dalam memahami dan menjelaskan mekanisme perilaku manusia.

Pandangan eksistensialisme dan fenomenologis memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih dan mengembangkan diri atas tanggung jawab sendiri. Pandangan eksistensialisme menurut Core, (1977:340) menerangkan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu menyadari diri sendiri, unik, dan memiliki kapasitas tersendiri yang memungkinkan dia berpikir dan mengambil keputusan. Pendapat lain menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi (Titus, 1959:294). Kekuatan manusia untuk memilih alternatif dalam mengambil keputusan secara bebas di dalam keterbatasannya, adalah aspek esensial dari keberadaan manusia. Kaum eksistensialis memandang bahwa manusia bertanggungjawab atas

keberadaan dan takdir dirinya. Manusia tidak dibentuk oleh kekuatan pengkondisian yang deterministik.

Kebebasan yang dimiliki manusia bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan atau diperdebatkan, melainkan sesuatu kenyataan yang harus dialami oleh manusia itu sendiri. (Titus,1954:294). Kebebasan itu mengungkapkan tuntutan hakikat batiniah manusia dan menyatakan keadaan diri yang sejati dan otentik, yakni menghadapi pilihan, membuat keputusan, dan menerima tanggungjawab. Pandangan eksistensial, manusia lahir dalam keadaan tidak selesai dan oleh karena itu manusia bertanggungjawab atas keberadaan dirinya di dunia ini.

Kaum eksistensialis memandang bahwa kehidupan manusia terarah menuju keberadaan dirinya (*being*). Menurut faham Kierkegaard bahwa keberadaan diri adalah suatu kondisi dimana manusia memahami dan menghayati sumber keberadaannya, kehidupan jiwa yang lestari, takdir, dan kenyataan bahwa Tuhan adalah kekuatan tertinggi yang mutlak (Titus,1959). Sedangkan faham Nietzsche yang menyatakan doktrin bahwa "Tuhan itu mati", dan dia melihat keberadaan diri itu sebagai suatu kondisi yang mengarah kepada "Kehendak untuk Berkuasa" (*Will to Power*). Kehendak hidup menjadi kehendak untuk berkuasa. Menurut Nietzsche manusia tidak menemukan nilai melainkan menciptakan nilai dan memproyeksikan nilai itu ke dalam kehidupan dunia. Pemikiran faham Nietzsche ini menghadapkan manusia kepada ketiadaan nilai dan tujuan yang pasti, membawa kehidupan manusia ke dalam situasi nihilistik.

Kaum fenomenologis mengartikan keberadaan diri itu "menjadi di sana" ("to be the there") "di sana" bukan dalam arti dunia eksternal, melainkan pemahaman terhadap keterbukaan dunia (Hall & Lindzey,1981:320). Heidegger menafsirkan keberadaan diri itu dalam tiga persoalan pokok yang dia ajukan sebagai dasar pemahaman keberadaan manusia. Ketiga

persoalan itu ialah: kemahlukan manusia, keberadaan konkrit, dan keberadaan transendensial.

Manusia sebagai mahluk ingin mengetahui keberakhiran dirinya, kecemasan yang dialami manusia memungkinkan dia menjadi sadar akan keberadaannya. Manusia mampu mempertanyakan dirinya dan menembus misteri keberadaannya. Keberadaan manusia di dunia merupakan ciri esensial kehidupan. Akan tetapi keberadaan ini sering membawa manusia ke dalam situasi kehidupan hampa tanpa pangkal tempat bertolak, karena dia kehilangan kesadaran akan keberadaan dirinya dalam kenyataan akhir (ultimate reality). Oleh karena itu, menurut Heidegger, keberadaan konkrit ini harus ditransendesikan sehingga manusia menjadi terbuka terhadap totalitas keberadaan yang sudah ada (being to such). Tanpa transendensi, apa yang diketahui dan dipelajari manusia akan semata-mata menjadi kumpulan data positivistik. Persoalan manusia ialah "...become existentially what he is essentially" (Titus, 1959:301). Manusia dapat mengetahui melalui wawasan tentang keberadaan diri sendiri. Untuk memahami keberadaan yang telah ada itu, manusia dituntut untuk hidup dan berbuat melalui proses pengambilan keputusan.

Pemikiran Jaspers (Titus, 1959:301) juga sama dengan pemikiran Heidegger tentang penemuan makna yang tidak dapat dicapai melalui pemikiran positivistik belaka, melainkan harus melalui spirit dan penerimaan bentuk-bentuk idealisme dan pengujian keberadaan pribadi. Untuk sampai kepada keberadaan pribadi ini, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang harus dipertimbangkan manusia, yaitu kedirian, komunikasi dengan sesama dalam kehidupan sosial, dan keragaman struktur kesejarahan masyarakat. Jasper pun memandang bahwa kebermaknaan hidup itu akan diperoleh dari keberadaan diri yang otentik, yakni diri yang

bertransenden, dan proses transendensi itu dipandu oleh cinta kasih, iman, dan wawasan.

Pandangan tentang manusia secara menyeluruh merupakan hasil pemikiran yang tidak hanya berkisar pada kajian manusia dalam kaitannya dengan diri sendiri dan lingkungan dunia yang masih terbatas, melainkan menjangkau hakikat manusia secara menyeluruh dan utuh. Pandangan yang menyeluruh dan utuh ini hendaknya mampu menjelaskan secara penuh arti dan maknadari harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia inilah yang benar-benar membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya di seluruh alam semesta.

Prayitno (2009: 13-14) manusia mencerminkan kebutuhan-kebutuhan dirinya, kemampuan berpikir dan merasanya, kehidupan dan budayanya, kemampuan untuk menambah dan menguasai lingkungan serta menjangkau daerah-daerah yang semakin luas, serta kemampuan spiritual sampai keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat manusia yang didalamnya terkandung harkat dan martabat manusia,yaitu bahwa manusia adalah: makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaan dan pencitraannya, makhluk yang paling tinggi derajatnya, khalifah di muka bumi, dan pemilik hak-hak asasi manusia (HAM).

Hakikat manusia itu merupakan inti dari kemanusiaan manusia. Mulai dari awal penciptaannya, dalam kondisi keberadaannya di atas bumi, sampai dengan perjalanannya kembali ke hadapan Sang maha Pencipta, hakikat kemanusiaan yang terukir pada lima konsep dasar harkat dan martabat manusia itu tetap melekat pada diri manusia. Manusia memperoleh kehormatan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan hakikat dirinya itu dalam keseluruhan proses kehidupannya di dunia dan di akhirat. Berbekal

hakikat yang selalu melekat pada dirinya, manusia mengembangkan kehidupannya di atas bumi. Keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunaikan melalui peribatan yang tulus dan ikhlas; citra kesempurnaan dan keindahannya diwujudkan melalui penampilan budaya dan peradaban yang terus berkembang; ketinggian derajatnya ditampilkan melalui upaya menjaga kehormatan dan menolak hal-hal yang merendahkan nilai-nilai kemanusiannya; kekhalifahan diselenggarakan melalui penguasaan dan pengelolaan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kehidupan damai dan sejahtera dalam alam yang nyaman dan tenteram; dan hak asasi manusia dipenuhi melalui saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling melindungi, mensejahterakan dan membahagiakan. Teraktualisasikannya hakikat dirinya, manusia akan dapat menemukan kehidupan di dunia dan di akhirat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu kehidupan yang mulia, bermartabat dan membahagiakan. Kehidupan demikian itu diatur dengan memenuhi hak-hak asasi masing-masing individu dalam keseluruhan kemanusiaannya.

Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan, manusia patut mengembangkan diri atas dasar kemerdekaan pikiran dan kehendak yang dilandasi iman dan takwa kepada penciptanya, dalam tatanan kehidupan bersama yang tertuju kepada pencapaian kehidupan yang sejalan dengan fitrahnya. Kondisi eksistensial manusia ini mengandung implikasi bahwa manusia berada dalam proses menjadi menuju keberadaan diri sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan.

Upaya pendidikan hanya dikenal dalam kehidupan manusia yang berlangsung dalam lintas generasi dan konteks kultural. Pendidikan adalah upaya membawa manusia dari kondisi apa adanya (*what it is*) kepada kondisi bagaimana seharusnya (*what should be*). Pendidikan tidak akan terlepas dari dan bahkan akan selalu terkait dengan manusia yang

sedang berada dalam proses berkembang dengan segala dimensi keunikannya. Terkandung makna disini bahwa melalui proses pendidikan diharapkan manusia berkembang kearah bagaimana dia harus menjadi dan berada. Jika pendidikan ini dipandang sebagai suatu upaya untuk membantu manusia menjadi apa yang bisa diperbuat dan bagaimana dia harus menjadi dan berada, maka pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidik perlu memahami manusia dalam hal aktualisasinya, kemungkinan (possibilities), dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi dalam diri manusia (Sunaryo Kartadinata, 2011:9).

Dimensi kemanusiaan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan adalah dimensi kefitrahan, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Kata kunci kandungan dimensi kefitrahan adalah kebenaran dan keluhuran, dimensi keindividualan adalah potensi dan perbedaan, dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kebersamaan, dimensi kesusilaan adalah nilai dan moral, dan dimensi keberagamaan adalah iman dan takwa. Kelima dimensi kemanusiaan saling terkait. Dimensi kefitrahan menduduki posisi sentral yang mendasar keempat dimensi lainnya. Dimensi keindividualan, kesusilaan dan kesosialan saling terkait antara ketiganya, dan ketiganya itu terkait dengan dimensi kefitrahan dan keberagamaan; sedangkan dimensi keberagamaan merupakan bingkai dan sekaligus wajah dan keseluruhan aktualisasi kehidupan individu dengan kelima dimensinya (Prayitno, 2009:15-17).

Pelaksanaan pendidikan adalah upaya normatif. Kejelasan pandangan tentang hakikat manusia mutlak diperlukan di dalam pendidikan, karena pandangan itu akan menjadi dasar arah normatif strategi pendidikan. Pemikiran tentang hakikat manusia membawa implikasi imperatif bagi

pendidikan untuk tidak terpaku pada ke-kini-an dan ke-disini-an (*here and now*), walaupun aspek itu diakui cukup penting.

Pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus (Bereiter,1973:6). Mendidik anak berarti bertindak secara bertujuan dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik sebagai satu kesatuan pribadi. Apa yang patut dilakukan dan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam proses pendidikan merupakan suatu pilihan moral yang mempunyai tujuan dan fokus yang jelas. Hakikat manusia yang lahir dengan fitrahnya dan memiliki kemerdekaan untuk berkembang, maka pendidikan harus dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan kemerdekaan manusia yang memungkinkan manusia bereksistensi dan berekstensi menuju arah berinsistensi, sebagai titik puncak dari penduniaannya (Driyarkara, 1980:57).

Pengembangan kemerdekaan manusia melalui pendidikan, tidak lepas dariu dialektika kemerdekaan sebagai bagian dari hakikat manusia. Diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara, 1962:4) bahwa " Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat tiga macam: berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Beratlah kemerdekaan itu! Bukan hanya tidak diperintah saja, akan tetapi harus dapat menegakkan dirinya dan mengatur perikehidupan dengan tertib. Hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain.

Ki Hadjar Dewantara pada waktu mengembangkan sistem pendidikan melalui perguruan Taman Siswa mengartikan pendidikan sebagai usaha suatu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan benih turunan bangsa iktu. Manusia sebagai individu harus dikembangkan jiwa raganya dengan mempergunakan segala alat pendidikan yang didasarkan adat istiadat bangsa itu. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengembangkan

sistem among sebagai sistem pendidikan yang mendasari asas kemerdekaan dan kodrat alam.

Sistem pendidikan itu dikembangkan berdasarkan lima asas yang dikenal sebagai panca Darma Taman Siswa, Panca Darma ini meliputi:

- a. Asas kemerdekaan yang berarti disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- b. Asas kodrat alam, yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu, sebagai makhluk, adalah satu dengan kodrat alam ini. Ia tidak dapat lepas dari alam, tetapi ia akan berbahagia apabila dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. Oleh karena itu, setiap individu harus berkembang dengan sewajarnya.
- c. Asas kebudayaan, yang berarti bahwa pendidikan harus membawa kebudayaan itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia dan kepentingan rakyat lahir batin pada setiap zaman dan keadaan.
- d. Asas kebangsaan yang tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malah harus menjadi bentuk dan fiil kemanusiaan yang nyata, dan oleh karena itu tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju ke arah kebahagiaan hidup lahir batin seluruh bangsa.
- e. Asas kemanusiaan yang menyatrakan bahwa darma setiap manusia itu adalah perwujudan kemanusiaan yang harus terlihat pada kesucian batin dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya (Rohman Natawidjaya, ed., 1978).

Ki Hajar dewantara memberikan gambaran mengenai Pancadarma itu sebagai berikut: "berikan kemerdekaan kepada anak-anak kita; bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata, dan menuju kearah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan itu dapat menyelematkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. (KI Hajar Dewantara,1959).

J.J. Rousseau, mengartikan pendidikan itu identik dengan kehidupan. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan adalah proses kehidupan dan bukan proses untuk mempersiapkan hidup. Hidup yang sewajarnya adalah hidup di mana manusia dapat mewujudkan diri sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Pendidikan adalah proses perwujudan diri tersebut (Wilds & Lotticj,1961:246). Rousseau berkeyakinan bahwa pendidikan itu diselenggarakan oleh alam, manusia, dan benda. Lebih lanjut Rousseau mengemukakan: Pendidikan datang kepada kita dari alam, dari manusia, atau dari benda-benda. Pertumbuhan yang terjadi di dalam diri kita yang berupa pertumbuhan organ dan kemampuan-kemampuan merupakan pendidikan dari alam,cara penggunaan yang dipelajari untuk melangsungkan pertumbuhan ini merupakan pendidikan diri manusia, dan hal-hal yang diperoleh melalui pengalaman dari sekitar kita adalah pendidikan dari benda-benda (Rousseau,1950:6).

R.J.Havighurst (1961:5) berpendapat bahwa pendidikan harus dipandang sebagai upaya masyarakat, melalui sekolah,untuk membantu individu mencapai tugas perkembangannya (*developmental task*). Havighurst (1961:2) mengartikan tugas perkembangan itu sebagai ... suatu tugas yang muncul pada atau kira-kira pada saat tertentu dalam jalan hidup individu, yang apabila tugas itu dapat dilaksanakan dengan berhasil akan

membawa kebahagiaan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas selanjutnya; sedangkan kegagalan melaksanakannya menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, membawakan penolakan masyarakat pada dirinya, dan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan tugas berikutnya.

Dewey (1958:62) menekankan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses pertumbuhan (growth). Dalam hal ini dia menulis: Karena pertumbuhan merupakan ciri khas dari kehidupan, maka pendidikan menjadi satu dengan pertumbuhan, tanpa akhir. Tolok ukur mutu pendidikan di sekolah adalah sampai dimana sekolah itu dapat menciptakan suasana untuk pertumbuhan dan menyajikan cara-cara untuk membuat pertumbuhan itu terlaksana dengan baik.

Pendidikan dipandang bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju tingkat kedewasaannya. Pendidikan tidak dipandang hanya sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan.

Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, maupun sebagai warga negara atau warga masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan direncana dalam memilih isi (materi) strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, berupa pendidikan informal,

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Apabila diarahkan dengan keberadaan dan hakikat kehidupan manusia, kegiatan pendidikan diarahkan kepada empat aspek pembentukan kepribadian manusia yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk beragama (religius).

Pendidikan merupakan gejala yang universal, dimana ada manusia, di sana ada pendidikan. Gejala yang universal ini bukanlah hanya sekedar gejala yang melekat pada manusia saja, melainkan merupakan usaha untuk memanusiaikan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Oleh karena pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara dengan baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Disinilah muncul keharusan adanya pemikiran teoritis tentang pendidikan.

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang.

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia, dimana iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber kehidupan semua bidang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir (1) menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Hakikat Pendidikan

a. Hakikat Pendidikan dalam Konteks Pembangunan Nasional

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Inti dari pada pembangunan pendidikan nasional ialah upaya pengembangan sumber daya manusia unggul dalam rangka mempersiapkan masyarakat dan bangsa kita menghadapi millenium ketiga sebagai era yang kompetitif.

Hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah : (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Hakekat Pendidikan sebagai Proses Pembudayaan dan Pemberdayaan Manusia

Esensi dari pendidikan merupakan usaha untuk memajukan dan mengembangkan kecerdasan, kepribadian, dan fisik peserta didik. Dengan demikian keberhasilan suatu proses pendidikan sangat tergantung pada sejauh mana berkembangnya kecerdasan, kepribadian dan fisik tersebut dapat dicapai bersama-sama. Tinggi dan rendahnya perkembangan dan pertumbuhan ketiga mantra tersebut sangatlah menentukan tingkat keberhasilan proses pendidikan bagi peserta didik, di sisi lainnya kebersamaan berkembang dan bertumbuhnya ketiga mantra juga menjadi faktor penentu.

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertian dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional.

Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis. Ada beberapa prinsip yang bisa menjelaskan tentang manusia bagi kepentingan pendidikan, yang diurai sebagai berikut:

Pertama, manusia memiliki sejarah. Manusia adalah makhluk yang mampu melakukan *self reflection*, ia mampu keluar dari dirinya dan menengok ke belakang, kemudian mengadakan penelitian dan perenungan. Perenungan merupakan koreksi terhadap masa lalu untuk sebuah kombinasi baru di masa depan.

Kedua, manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya. Artinya, masing-masing manusia memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya, baik lahir maupun batin. Penyelenggara pendidikan harus memahami hal-hal seperti itu. Jika prinsip individualitas tidak dipahami maka yang terjadi adalah kesenjangan dan ketimpangan.

Ketiga, manusia selalu membutuhkan sosialisasi di antara mereka. Eksistensi manusia adalah eksistensi bersama. Hubungan sosial antar-manusia ini mengandaikan hubungan dua subyek yang saling meminta supaya diterima dengan senang hati yang jujur dan baik. Oleh karenanya, hubungan dasar antara dua subjek merupakan hubungan keadilan,

kebaikan, dan egaliter. Manusia lain dipandang sebagai pribadi yang harus dipersilakan mengembangkan dirinya sendiri.

Keempat, manusia mengadakan hubungan juga dengan alam sekitarnya. Kesadaran manusia menyatakan bahwa ketersediaan alam belum semuanya cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, manusia perlu kerja, dengan kerja, manusia telah mengatasi jarak antara dirinya dengan alam. Kerja tidak hanya mengangkat alam ke dalam tataran manusiawi, tetapi juga membantu manusia menemukan kesosialannya. Kerja membantu manusia mewujudkan dirinya sebagai pribadi, disamping dengannya manusia bias mendidik diri, menyuarakan kebebasan, dan otonomi. Kerja yang dimaksud di sini merupakan perbuatan mencipta dengan tetap mengandung dimensi manusiawi. Ia merupakan gabungan budi dan rasa yang berdaya menafsirkan dunianya.

Kelima, manusia dalam kebebasannya mengolah alam pikir dan rasa telah menemukan Yang Transendental. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terlembagakan dalam kepercayaan atau iman merupakan terobosan manusia, keluar dari eksistensi empirisnya yang terbatas menuju sumbernya yang pertama dari eksistensi dirinya dan dunia. Hubungan ini dapat terselenggara hanya dengan kontemplasi, dan oleh agama direalisasikan melalui doa-doa, kebaikan-kebaikan, dan kesalehan.

Kelima prinsip kemanusiaan sebagaimana tersebut di atas itulah yang menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan memahami esensi dari prinsip kemanusiaan maka penyelenggaraan pendidikan akan berjalan dengan baik.

Proses pendidikan harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusia. Terkandung makna di sini bahwa melalui proses pendidikan diharapkan manusia berkembang kearah bagaimana

dia harus menjadi dan berada. Jika pendidikan ini dipandang sebagai suatu upaya untuk menjadi manusia menjadi apa yang bias diperbuat dan bagaimana dia harus menjadi dan berada, maka pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidik perlu memahami manusia dalam hal aktualisasinya, kemungkinannya, dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi dalam diri manusia.

Pendidikan bila di tinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berakhlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak.

Budaya atau kebudayaan (*culture*) adalah pandangan hidup sekelompok orang (Berry dkk,1999) yang meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas`pendukungnya (Prosser, 1978). Dipandang dari persepektif budaya, situasi pendidikan adalah sebuah “perjumpaan cultural” (*cultural encounter*) antara pendidik dengan peserta didik. Implikasi dari pendidikan adalah proses belajar, transferensi dan kaunter transferensi, serta saling menilai. Hal ini menuntut pendidik untuk perlu memiliki kepekaan budaya untuk dapat memahami dan membantu peserta didik. Pendidik yang demikian adalah pendidik yang menyadari benar bahwa secara kultural, individu memiliki karakteristik yang unik dan ke dalam proses pendidikan ia membawa serta karakteristik tersebut. Upaya untuk memiliki kepekaan budaya adalah, pendidik perlu mempunyai pemahaman yang kaya tentang berbagai budaya di luar budayanya

sendiri, khususnya berkenaan dengan latar belakang budaya peserta didik di Indonesia.

Pada dasarnya pendidikan sebagai proses kebudayaan (*cultural process*) bagi setiap peserta didik. Dalam konteks pendidikan sebagai proses pembudayaan maka setiap pendidikan itu berlangsung senantiasa harus dilakukan dengan pendekatan budaya. Apabila pendidikan tidak dilakukan dengan pendekatan budaya maka hanya akan melahirkan orang-orang yang tidak beradab.

Proses pendidikan harus berpusat pada peserta didik (*student centered*), bukan pada pendidik atau orang lain yang menjadi bagian dari proses pendidikan tersebut. Ketika proses pendidikan akan dilangsungkan, maka pertama kali yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan ialah kesiapan peserta didik, sejauh mana tingkat kecerdasannya, bagaimana kepribadiannya, serta bagaimana kondisi tubuhnya. Bahwasannya kesiapan pendidikan media lingkungan juga sangat penting akan tetapi semua itu tidak dapat menggeser keutamaan peserta didik. Bahwa pendidikan itu juga sering diartikan sebagai suatu proses pengabdian kepada sang anak, hal itu menunjukkan bahwa demikian penting dan strategisnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan itu sendiri.

Muara dari upaya pendidikan adalah upaya membangun atau menumbuhkan kembangkan potensi peserta didik, atau dengan kata lain pendidikan akan selalu berpusat pada peserta didik. Karena pendidikan tersebut harus berpusat pada peserta didik maka dalam prosesnya harus berpedoman pada keinginan, gagasan dan juga kreativitas peserta didik (*tut wuri handayani*). Oleh karena setiap anak memiliki kecerdasan dasar, kepribadian dasar, dan kondisi tubuh yang berbeda maka dalam pengembangannya disesuaikan pada keinginan, gagasan dan kreativitas

masing-masing peserta didik. Hanya saja manakala ditemui keinginan, gagasan, dan kreativitas yang tidak mendidik barulah pamong atau pendidik memberikan bimbingannya. Hal ini menuntut pendidik harus pandai-pandai menyesuaikan peserta didik, dan bukan peserta didik yang harus menyesuaikan pendidiknya.

Upaya pendidikan adalah upaya normatif. Keajegan pandangan tentang hakikat manusia mutlak diperlukan di dalam pendidikan, karena pandangan itu menjadi dasar arah normative strategi upaya pendidikan (Mungin Eddy Wibowo, 2001). Meskipun pendidikan itu tidak pernah berlangsung dalam kevakuman dan tidak pernah steril dari nilai-nilai sosial budaya, pendidikan bukanlah proses transformasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya belaka. Pendidikan adalah proses individuasi, yaitu membantu manusia berkembang sesuai dengan fitroh kemerdekaannya, dengan memperhatikan keragaman pribadi dari setiap pendidik.

Proses pendidikan menyangkut pengembangan seluruh dimensi kepribadian manusia, mengembangkan kesadaran manusia akan makna hidup sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Dalam pengembangan kesadaran terkandung makna bahwa pendidikan merupakan proses humanisasi; proses memanusiakan manusia yang akan membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Pendidikan adalah fenomena fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia akan menemukan eksistensinya. Eksistensi manusia adalah eksistensi sosio-budaya, karena proses memanusiakan diri berarti juga proses membudayakan diri yang akan menyangkut eksistensi bersama dan menyangkut kehidupan orang lain. Oleh karena itu pendidikan harus menempatkan keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat

mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Pendidikan ada dan berlangsung di dalam proses sosio-budaya yang sekaligus sebagai wahana pengemban dan pengembang kehidupan sosio-budaya suatu bangsa. Pendidikan sebagai upaya sadar untuk menciptakan manusia sadar akan dirinya secara kultural, yang dapat memunculkan kekuatan moral, dan jika kekuatan ini dimiliki oleh cukup banyak manusia akan dapat mengubah corak kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pendidikan sebagai proses interaksi, selalu berhadapan dengan kepribadian manusia yang sedang dalam proses menjadi. Pendidikan bertugas membantu manusia mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi, meskipun secara umum dan konseptual hukum-hukum perkembangan dan dinamika kepribadian itu dapat dijelaskan. Namun, hakikatnya pendidikan itu merupakan proses yang bersifat individual sehingga strategi pendidikan harus dilengkapi dengan strategi khusus yang lebih intensif dan menyentuh dunia kehidupan secara individual. Strategi ini dapat memperhalus, menginternalisasi, dan mengintegrasikan sistem nilai dan pola perilaku yang dipelajari lewat proses pendidikan secara umum (Kartadinata, 1987:104).

c. Hakekat Pendidikan sebagai Upaya Pengembangan Kemampuan Manusia

Paradigma baru dalam pendidikan mengisyaratkan aktualisasi keunggulan kemampuan manusia yang kini masih tersembunyi dalam dirinya. Upaya

dalam pengembangan manusia ada dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kemampuan manusia.

Pengembangan sumber daya manusia atau *Human Resource Development (HRD)*, terutama terfokus pada keterampilan, sikap dan kemampuan produktif ketenagakerjaan sehingga diperlakukan manusia sebagai “sumber untuk dimanfaatkan” (yaitu sebagai obyek), dalam mencapai tujuan ekonomi, terutama dalam jangka waktu pendek. Pengembangan itu tidak terjadi dari dalam, melainkan “diatur dari atas” sesuai kepentingan lingkungannya. Seyogyanya pendidikan itu teralihkan fokusnya kepada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development (HCD)* sepanjang hayat yang berhak dan mampu memilih berbagai peran dalam meraih berbagai peluang partisipasi, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua, atau sebagai pekerja dan konsumen, yaitu suatu perkembangan yang arah dan sasarannya terutama terjadi dari dalam, namun disulut untuk aktualisasinya.

Karena itu, HCD menunjuk pada konstelasi keterampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian (Levinger,1996), sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia. HCD bermutu adalah proses kontekstual dan futuristik sehingga HCD melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan tuntutan dunia kerja pada saat ini, melainkan manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat, serta dilandasi sikap, nilai, etik dan moral. Kebermutuan HCD tidak hanya terletak pada kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual.

Di dalam pengembangan pribadi, individu perlu memperoleh kesempatan berpikir dan pengalaman berpikir tentang bagaimana dia hendak membangun dirinya, apa yang sudah dibangun, dan memperhadapkan diri dengan kebermaknaan yang akan menjadi arah tujuan mengembangkan diri pada masa yang akan datang. Asumsi ini mengandung implikasi bahwa pendidikan yang bersifat umum dan klasikal, yang dalam banyak hal lebih banyak peduli terhadap belajar intelektual, perlu dibarengi dengan strategi upaya yang secara sistematis untuk membantu individu mengembangkan pribadi, memperhalus dan menginternalisasi nilai-nilai yang diperoleh di dalam pendidikan, serta mengembangkan keterampilan hidup.

Pendidikan adalah kendaraan mencapai keterwujudan unggulan manusia berdasarkan motivasi instrinsik, menuju pada kinerja yang akuntabel, berkualitas dan otonom sebagai manusia yang bermartabat, bukan semata sebagai manusia yang harus mengisi keseimbangan antara *supply* dan *demand*. Dari sudut pandang manajemen, orientasi HCD terfokus pada *brain power planning* dan bukan terutama pada *man power planning*. Meskipun kedua orientasi tidak sepenuhnya bertentangan, namun analisis dari kemengapaan, terutama HCD akan menampilkan proses *inquiry* yang sifatnya multidimensional. Selain itu, orientasi itu berdasarkan perspektif pengembangan jangka panjang yang jauh melebihi jangkauan relevansi dan efisiensi semata, karena memiliki refleksi terhadap aspek kompleks kualitatif perkembangan masyarakat. Sebaliknya, *man power planning* yang dilandasi oleh paradigma *supply and demand*, banyak tgerhalang oleh berbagai kendala, antara lain berkenaan dengan perubahan cepat teknologi akibat perkembangan iptek yang merupakan tuntutan pasar dan mempersyaratkan keterampilan baru dalam memasuki dunia kerja.

d. *Hakekat Pendidikan sebagai Investasi SDM*

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM (*human capital investment*) sehingga mampu menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk turut andil atau berperan serta dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pelaksanaan pendidikan harus dapat mengembangkan dan menyebarkan nilai dan sikap produktivitas SDM melalui pengembangan dua kemampuan sekaligus, yaitu:

Pertama kemampuan teknis seperti peningkatan penguasaan kecakapan, potensi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja yang berubah.

Kedua, kemampuan lain dalam kaitan dengan budaya yang mendorong SDM untuk menjadi kekuatan penggerak pembangunan, seperti wawasan, penalaran, etos kerja, orientasi ke depan, kemampuan belajar secara terus menerus, dan sejenisnya. Kemampuan untuk mengembangkan kedua kekuatan SDM itu, pendidikan sebagai suatu investasi SDM memiliki fungsi yang paling menonjol yaitu sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan tingkat balikan yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Investasi SDM berbeda dengan investasi sektor fisik karena pada sektor fisik rentang waktu antara investasi dan tingkat baliknya lebih terukur (*measurable*) dalam jangka pendek. Investasi pendidikan lebih berjangka panjang, tingkat balikan terhadap investasi pendidikan tidak dapat dinikmati dalam ukuran waktu 1-2 tahun, melainkan belasan dan bahkan mungkin puluhan tahun. Indikator-indikator manfaat pendidikan juga lebih halus dan tidak selalu tampak secara langsung bahkan mungkin tidak

selalu dapat diukur, sehingga harus diamati melalui indikator-indikator yang tidak langsung. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya metode-metode dan alat ukur dalam analisis investasi pendidikan, maka manfaat pendidikan sudah mulai dapat diukur secara langsung, misalnya melalui pengukuran penghasilan seseorang, penghasilan negara, dan pajak yang diterima oleh negara relative terhadap biaya yang dikeluarkan untuk investasi pendidikan.

Karena sifatnya berjangka panjang, maka investasi pendidikan memiliki rentang waktu (*lead time*) yang panjang pula. Jarak antara waktu seseorang menjalani pendidikan dengan waktu ia memasuki masa produktif dalam masyarakat dan lapangan kerja tidaklah pendek. Dalam keadaan normal, rentang waktu ke depan seorang lulusan SMP adalah 9 tahun, sekolah menengah adalah 12 tahun, Sarjana (S1) sekitar 16 tahun. Rentang waktu yang panjang tersebut itulah, maka investasi pendidikan dituntut untuk lebih berorientasi ke masa depan. Investasi pendidikan dapat dipandang sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah dalam sektor-sektor produktif yang dapat memacu pertumbuhan secara tepat. Nilai tambah tersebut dihasilkan dari keterampilan, dan keahlian yang diperoleh seseorang dapat disumbangkan dengan derajat profesionalisasi yang semakin tinggi lagi. Sehingga, pada gilirannya akan semakin memungkinkan bagi seorang SDM terdidik untuk dapat menghasilkan karya-karya unggul dengan mutu bersaing sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan demikian peranan pendidikan dalam menggerakkan pendapatan masyarakat dan negara dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Investasi SDM melalui pendidikan dapat dibedakan dengan berlandaskan pada tiga konsep dalam ekonomi publik, yaitu pendidikan sebagai barang dan jasa umum (*public goods*); pendidikan sebagai barang dan jasa produktif (*productive goods*); dan pendidikan sebagai barang dan jasa

capital (*capital goods*). Ketiga konsep ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan baik dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan, maupun dalam pembagian tanggung jawab investasi SDM melalui pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat.

Pendidikan bermutu akan dapat terwujud jika upaya pendidikan dapat membantu individu menjadi insane yang produktif baik dalam arti menghasilkan barang atau jasa atau hasil karya lainnya, maupun menghasilkan suasana lingkungan atau suasana hati serta alam pikiran yang positif dan menyenangkan. Individu produktif seperti ini perlu memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, bersikap dan menerapkan nilai-nilai berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan.

Manusia produktif merupakan wujud dari SDM yang berkualitas, merupakan manusia yang berkembang secara utuh yang menyelenggarakan kehidupannya secara berguna bagi manusia lain dan lingkungannya. Manusia produktif adalah manusia yang mampu mengembangkan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan yang terkait dengan masa depan. Pendidikan mengupayakan pengembangan segenap potensi individu secara optimal pada setiap tahap perkembangan, dan berperan aktif dalam pembentukan manusia produktif. Pengembangan ini akan dilengkapi dan meningkatkan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan dengan pengembangan nilai dan sikap (Mungin Eddy Wibowo, 2000).

4. Pendidikan dan Bimbingan Konseling

Konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah memiliki peranan penting berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pendidikan dapat memanfaatkan konseling sebagai mitra kerja

dalam melaksanakan tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan (Dahlan,1988:22). Konseling menyediakan unsur-unsur di luar individu yang dapat dipergunakan untuk memperkembangkan diri (Crow & Crow, 1960). Mengacu kepada pernyataan tersebut, dalam arti luas konseling dapat dianggap sebagai bentuk upaya pendidikan, dan dalam arti sempit konseling dapat dianggap sebagai teknik yang memungkinkan individu menolong dirinya sendiri. Perkembangan dan kemandirian individu dipentingkan dalam proses konseling yang sekaligus merupakan proses pendidikan. Untuk dapat berkembang dengan baik dan mandiri, individu memerlukan pengetahuan dan keterampilan, jasmani dan rohani yang sehat, serta kemampuan penerapan nilai dan norma-norma hidup kemasyarakatan.

Integrasi konseling dalam pendidikan juga tampak dari dimasukkannya secara terus menerus program-program konseling ke dalam program-program sekolah (Belkin,1975; Borbers & Drury,1992); konsep-konsep dan praktek-praktek konseling merupakan bagian integral upaya pendidikan (Mortensen & Schmuller,1964). Kegiatan konseling akan selalu terkait dengan pendidikan, karena keberadaan konseling dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu sendiri. Konseling merupakan proses yang menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah (Rochman Natawidjaja, 1978:30), karena program-program konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya menyangkut kawasan kematangan pendidikan dan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial. Hasil-hasil konseling pada kawasan itu menunjang keberhasilan pendidikan yang bermutu pada umumnya. Dalam keadaan tertentu konseling dapat dipergunakan sebagai metode dan alat untuk mencapai tujuan program pendidikan di sekolah.

Konseling yang dilakukan oleh konselor sebagai bentuk upaya pendidikan, karena kegiatan konseling selalu terkait dengan pendidikan dan keberadaan konseling di dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis dari upaya pendidikan itu sendiri. Dahlan (1988:22) menyatakan bahwa konseling tidak dapat lepas dan melepaskan diri dari keseluruhan rangkaian pendidikan.. Konseling sebagai upaya pendidikan memberikan perhatian pada proses, yaitu cenderung memperhatikan tugasnya sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan pada anak mencapai suatu tingkat kehidupan yang berdasarkan pertimbangan normative, antropologis (memperhatikan anak selaku manusia) dan sosio kultural. Dengan demikian, konseling tidak mungkin melepaskan diri dari keseluruhan rangkaian pendidikan. Dengan perkataan lain, pendidikan dapat memanfaatkan konseling sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugasnya

Secara fungsional, konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan. Konseling merupakan proses yang menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, karena program-program konseling meliputi aspek-aspek perkembangan individu, khususnya menyangkut kawasan kematangan pendidikan, kematangan karir, kematangan persona dan emosional, serta kematangan sosial. Hasil konseling dalam kawasan ini menunjang keberhasilan pendidikan umumnya.

Pendidikan sebagai *proses interaksi*, selalu berhadapan dengan kepribadian manusia yang sedang berkembang dalam proses menjadi.

Pendidikan bertugas membantu manusia mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi, dan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan merupakan proses yang bersifat individual sehingga strategi pendidikan harus dilengkapi dengan strategi khusus yang lebih intensif dan menyentuh dunia kehidupan secara individual. Strategi ini dapat memperhalus, menginternalisasi, dan mengintegrasikan sistem nilai dan pola perilaku yang dipelajari lewat proses pendidikan secara umum (Kartadinata,1987:104). Bentuk strategi khusus ini dapat ditemukan dalam kegiatan konseling baik konseling individual maupun kelompok yang dilakukan oleh konselor profesional yang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan.

Intervensi konseling dalam merealisasikan fungsi pendidikan akan terarah kepada upaya membantu individu yang dapat dilakukan melalui konseling untuk memperhalus, menginternalisasi, memperbaharui dan mengintegrasikan sistem nilai dan pola perilaku yang mandiri. Dalam proses konseling amat mungkin diperlukan dan digunakan berbagai metode dan teknis psikologis untuk memahami dan mempengaruhi perkembangan perilaku individu, dengan tetap berstandar dan terarah kepada pengembangan manusia sesuai dengan hakikat eksistensinya. Konseling mengemban tanggung jawab untuk membantu individu mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika dan kehidupan sosial.

Hakikat manusia dengan segenap dimensi kehidupan manusia yang perlu dikembangkan, yaitu dimensi spiritual dan psikologis, sosio-emosional, fisik, serta segenap tujuan dan tugas kehidupan menjadi landasan bagi konsepsi dan penyelenggaraan konseling. Manusia adalah segala-galanya

bagi pelayanan konseling. Ini berarti bahwa hakikat tujuan konseling harus bertolak dari sistem nilai dan kehidupan yang menjadi rujukan manusia yang ada dalam sistem kehidupan tersebut. Teori dan konsep konseling yang didasarkan pada sistem kehidupan sosial dan budaya tertentu belum tentu berlaku bagi sistem kehidupan sosial dan budaya lain, untuk itu diperlukan perspektif sosiologis tentang hakikat tujuan konsling dan kehidupan individu yang hendak dilayani.

Keberadaan konseling dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia dijalani melalui proses panjang sejak kurang lebih 48 tahun yang lalu. Pada saat ini keberadaan pelayanan konseling dalam *setting* pendidikan, khususnya persekolahan, telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Pelayanan konseling telah mendapat tempat di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Pengakuan ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan konseling. Secara eksplisit telah ditetapkannya:

- a. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- b. "Konselor" sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I pasal 1 butir 6 dinyatakan bahwa "pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”.

- c. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah.
- d. Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor pada Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 ayat (6) yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan.
- e. Penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling (konselor) pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling (konselor) dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa per tahun.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling ; (ii) berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 sub kompetensi.

Berbagai upaya kearah profesionalisasi konseling telah banyak dilakukan dan telah membawa profesi konseling khususnya dalam setting pendidikan persekolahan lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan dalam rentang diversifikasi kebutuhan yang amat luas menuntut profesi konseling untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada tatanan masyarakat dewasa ini pelayanan konseling tidak hanya dibutuhkan dalam setting pendidikan persekolahan tetapi juga dalam setting kehidupan masyarakat luas. Profesi konseling menjadi makin kokoh dan kepercayaan public (*public trust*) akan segera dapat diwujudkan dengan didukung oleh konselor sebagai tenaga profesional dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

5. Landasan Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling

Pada saat sekarang, mutu menjadi satu-satunya hal yang sangat penting dalam pendidikan. Kita semua mengakui saat ini memang ada masalah dalam sistem pendidikan. Lulusan pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi tidak siap memenuhi kebutuhan masyarakat, apa lagi di era pasar bebas sangat dituntut adanya kemampuan daya saing untuk dapat bersaing dan bersanding dengan bangsa-bangsa lain dalam tataran nasional dan internasional. Zaman terus berubah dan setiap bidang kehidupan semakin memiliki saling ketergantungan satu sama lain di dalam suatu sistem yang integral. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan haruslah semakin berorientasi keluar (*outward looking*) karena sistem pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang lebih luas yaitu sistem sosio-ekonomi yang kompleks yang harus dihadapi oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan sistem ketahanan nasional yang dimiliki oleh masyarakat.

Mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada sistem pendidikan. Kemampuan meningkatkan mutu harus dimiliki oleh sekolah sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau dikendalikan oleh pihak luar, termasuk pemerintah. Peningkatan mutu erat kaitannya dengan kreativitas pengelola satuan pendidikan dan guru dalam pengembangan kemampuan belajar siswa. Dalam dunia pendidikan, proses pendidikan yang bermutu mengacu pada kemampuan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan, mendistribusikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar lulusannya (Ace Suryadi dan Tilaar, 1993:163).

Mutu pendidikan adalah kemampuan setiap satuan lembaga pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar. Mutu pendidikan akan tercermin dalam tingginya hasil belajar yang dicapai oleh siswa, namun proses pendidikan yang bermutu tidak berarti harus secara langsung mengajarkan pengetahuan. Prestasi belajar tinggi seyogyanya dihasilkan dari meningkatnya kemampuan siswa yang tinggi untuk belajar secara

berkelanjutan atau mampu belajar sepanjang hayat (*life-long learning*). Mutu pendidikan ditentukan oleh dua kemampuan sekolah, yaitu kemampuan sekolah secara teknis kependidikan dan kemampuan dalam bidang pengelolaan. Prestasi belajar siswa dilahirkan dari kemampuan sekolah untuk mengelola suasana sekolah yang kondusif untuk siswa agar dapat belajar sebanyak mungkin melalui kegiatan belajar mandiri dan berkelanjutan. Prestasi belajar siswa dapat berkembang melalui pelatihan, penanaman disiplin serta pembiasaan dalam menerapkan kemampuan dasar untuk belajar secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendidikan di sekolah tidak hanya dilakukan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, pelatihan yang dilakukan oleh guru praktik, tetapi juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk membantu individu dalam mencari dan menetapkan pilihan serta mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, perencanaan dan pengembangan karir, serta kehidupan keberagamaan. Mutu pendidikan di sekolah akan dapat diwujudkan bilamana dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru praktik, dan konselor yang kompeten dan profesional yang mampu mengelola proses pendidikan secara profesional. Artinya, mampu mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan yang nyata didasarkan kepada pelayanan keahlian dalam mengelola pendidikan, baik pelayanan dalam pembelajaran, pelatihan, maupun konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya di sekolah.

Mutu pendidikan akan dapat diwujudkan bilamana pendidikan dilaksanakan secara tuntas. Pendidikan yang tuntas mengakui dan bahkan menekankan kemampuan manusia untuk bertanggung jawab. Pendidikan yang tuntas bertopang pada kejelasan norma, memiliki garis lurus yang membimbing pemikiran dan tindakan pendidikan, sehingga

karena kejelasan dasar, tujuan, dan garis pembimbingnya, kewaswasan dalam bertindak itu dapat dihindari. Pendidikan yang bagaimana yang memiliki kualifikasi tersebut? Dapatlah ilmu dan teknologi dijadikan penglima tertinggi dalam menciptakan pendidikan tuntas? Ilmu dan teknologi telah mencoba kearah itu dan sebegitu jauh telah memberikan kenyamanan hidup kepada umat manusia dewasa ini. Memang ilmu telah memberdayakan manusia, tetapi secara moral ia tetap lemah.

Apakah hidup kita harus diabdikan sekadar untuk mendapatkan kenyamanan sepiantas? Apa lagi kalau diingat bahwa ilmu selalu bersikap skeptis terhadap kebenaran? Bukankah kebenaran dipandang bersifat tentatif hipotetis? Bila demikian, maka melalui ilmu dan teknologi tidak akan didapat dasar dan arah yang jelas serta bimbingan perbuatan yang tuntas.

Mengapa perlu pendidikan yang tuntas dalam arti pendidikan yang mendapat tuntunan dari Atas, yaitu Allah SWT? Memang hanya dengan pendidikan yang tuntas kita dapat mengupayakan tercapainya manusia yang merealisasikan hidup takwa selaku manusia utuh. Pengertian utuh hendaknya diartikan sebagai lengkap, tiada cela, sehingga menampilkan pendirian yang kokoh dan mantap, bertolak dari niat yang ikhlas, bertindak secara selaras dengan jalan yang lurus, memperhatikan rangkaian perilaku yang sinkron, taat asas dalam usaha mencapai ridla Allah SWT. Manusia yang utuh menurut pandangan tuntas, mencerminkan manusia kaffah, dalam arti satu niat, ucap, pikir, perilaku, dan tujuan yang direalisasi dalam hidup bermasyarakat. Satu niat, ucap, pikir, perilaku, dan tujuan itu, akan membebaskan manusia dari konflik diri yang dapat mengarah kepada kepribadian terbelah. Untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas, kita perlu menciptakan situasi dan iklim pendidikan yang serasi dengan tujuan pendidikan. Bukankah sikap takwa akan lebih subur berkembang dalam iklim hidup religius? Iklim tersebut akan tercipta oleh

manusia itu sendiri, manusia pula yang menyambut iklim dan situasi untuk berperilaku tertentu, tapi pada akhirnya kemampuan manusia pun terbatas.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang tuntas tidak hanya didasarkan pada pelayanan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan layanan pelatihan yang dilakukan oleh guru praktik, tapi juga pada pelayanan *konseling* yang dilakukan oleh *konselor* sekolah. Melalui layanan konseling, konselor akan membantu terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengatasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.

Perubahan global tidak hanya menyangkut kualifikasi persyaratan orang untuk memasuki suatu pekerjaan tetapi juga pada waktu yang bersamaan muncul disorientasi personal dan ketidaktepatan orang dalam menempati suatu pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini proses belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) dan belajar sejangat hayat (*lifewide learning*) akan menjadi determinan eksistensi dan ketahanan hidup manusia. *Lifelong learning* adalah proses dan aktivitas yang terjadi dan melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dia selalu diperhadapkan kepada lingkungan yang selalu berubah yang menuntut dia harus menyesuaikan, memperbaiki, mengubah dan meningkatkan mutu perilaku untuk dapat memfungsikan diri secara efektif di dalam lingkungan. Proses belajar sepanjang hayat itu terjadi secara terpadu, menyangkut seluruh aspek kehidupan, terjadi keterpaduan antara belajar, hidup, dan bekerja yang satu sama lain tak dapat dipisahkan melainkan terjadi secara bersinergi (*lifewide learning*).

Dalam konteks kecenderungan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masyarakat global, muncul masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge base society*) sebagai suatu *learning society* yang memerlukan pendidikan dan latihan dalam sistem belajar sepanjang hayat, yang menawarkan kepada setiap warga masyarakat suatu fasilitas belajar untuk beradaptasi kepada pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Masalah-masalah yang tampak sebagai masalah sosial, ekonomi, dan politik bukanlah semata-mata masalah sosial, ekonomi, politik itu sendiri melainkan masalah-masalah kemanusiaan yang harus didekati dari sisi kemanusiaan.

Masyarakat yang berorientasi kemanusiaan ini menghendaki persyaratan nilai, sikap, kebijakan, dan tindakan untuk memperluas akses masyarakat kepada seluruh jenjang pendidikan, membuat manusia mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam pendidikan dan dunia kerja. UNESCO menganggap bahwa hal ini akan tercapai melalui pengembangan keterampilan untuk semua (*life development for all*), tidak eksklusif dan menjadikan pendidikan dan latihan sebagai hak asasi manusia yang dapat diakses.

Pendidikan holistik semacam ini memadukan persiapan hidup dan dunia kerja yang mencakup seluruh domain belajar yang memadukan pendidikan umum dan kejuruan dalam sebuah kontinum pengetahuan, nilai, kompetensi, dan keterampilan. Dalam pandangan seperti ini *konseling* menempati peran krusial untuk membantu manusia mampu memenuhi kebutuhan belajar baru dan memberdayakan manusia untuk memperoleh keseimbangan hidup, belajar, dan bekerja. Untuk mencapai tujuan ini UNESCO melihat bahwa konseling, terutama konseling karir adalah hal yang paling penting untuk seluruh peserta didik dan perannya diperluas untuk mempersiapkan peserta didik dan orang dewasa menghadapi perubahan dunai kerja. Dalam perspektif ini konseling menjadi suatu proses sepanjang hayat yang menyertai proses belajar

sepanjang hayat dalam segala jalur, setting, jenjang dengan segala tantangan dan kendalanya.

A European Guidance Forum/Lifelong Guidance Group (IAEVG, 2002) menegaskan bahwa: "Lifelong learning, guidance and counseling, education, training and employment are continuously intersecting cycles and systems in the lives of the European citizen. Information, guidance and counseling have a key role to play in facilitating access, progression and transitions between these cycles and systems over an individual's lifetime. Lifelong guidance provision requires the active co-operation of education, training and employment bodies both at national and European levels in order to make the lifelong learning principle reality". These are the words of the European Commission. It continues: 'Information, guidance and counseling have been identified as a key strategic component for implementing a lifelong learning policy'

Belajar sepanjang hayat dan sejangkat hayat menjadi strategi belajar masyarakat global karena beberapa alasan, terutama dalam (a) memelihara keberlanjutan akses terhadap belajar untuk menambah dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk keberlangsungan partisipasi dalam masyarakat berbasis pengetahuan, (b) meningkatkan investasi sumberdaya manusia, (c) membangun masyarakat inklusif yang memberi peluang yang sama untuk memperoleh akses belajar yang bermutu, (d) mencapai jenjang pendidikan dan kualifikasi vokasional yang lebih tinggi, dan (e) mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalam kehidupan publik, sosial, dan politik.

Dari perspektif konseling, kunci dasar untuk mencapai tujuan ini adalah perpektif baru tentang konseling yang berorientasi pada kemudahan individu dalam mengakses informasi bermutu tentang kesempatan belajar, memberikan bantuan pribadi untuk mengintegrasikan hidup, belajar, dan bekerja, menumbuhkembangkan individu sebagai pribadi, profesional, dan

warga negara yang *self motivated*. Dalam perspektif ini, konseling menjadi layanan yang dapat diakses secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, berorientasi holistik, mampu menyediakan layanan dalam rentang kebutuhan yang lebar dan bervariasi, termasuk orang-orang yang tak beruntung dan berkebutuhan khusus.

Konseling tidak hanya dipelajari sebagai seperangkat teknik, melainkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bernuansa kemanusiaan dan keindividuan. Nuansa dimaksud akan lebih tampak pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang menempatkan orientasi kemanusiaan dan belajar sepanjang hayat sebagai *central feature* kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan datang. Proses pendidikan tidak lagi sebagai proses parsial, melainkan sebagai proses holistik yang memadukan persiapan hidup dan dunia kerja yang mencakupi seluruh domain belajar, yang memadukan pendidikan umum dan kejuruan sebagai suatu kontinum pengetahuan, nilai, kompetensi, dan keterampilan. Dalam perspektif ini, konseling memiliki peran membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar baru dan memberdayakan mereka dalam memperoleh keseimbangan hidup, belajar, dan bekerja. Konseling menjadi proses sepanjang hayat (*lifelong counseling*) yang dapat diakses secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, berorientasi *holistic*, mampu menyediakan layanan dalam rentang yang lebar dan bervariasi, termasuk kelompok masyarakat yang beruntung.

Proses pendidikan mencakup usaha yang secara sadar dan intensional bertujuan untuk secara terus menerus meningkatkan dan/atau memperbaiki kondisi sasaran pendidikan untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kerangka konseling seperti ini berifat holistik yang menyatupadukan hakikat kemanusiaan, wawasan dan keilmuan, keterampilan, nilai serta sikap dalam pelayanan. Pendekatan pelayanan konseling bergeser dari *supply-side* ke *demand-side* dengan melakukan

upaya proaktif kepada masyarakat yang menjadi target layanan, menggunakan berbagai sumber dan teknologi informasi untuk memperkaya peran profesional, mengembangkan manajemen informasi dan jaringan kerja konselor, serta memanfaatkan berbagai jalur dan *setting* layanan. Profesi konseling harus senantiasa terbuka untuk berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan lingkungan akademis dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional dan kehidupan manusia pada umumnya.

Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, potensi, dan keunikan individu berdasarkan kajian dan penerapan ilmu dan teknologi dengan acuan dasar ilmu pendidikan dan psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan konseling yang diwarnai oleh budaya (termasuk di dalamnya nilai dan norma) Indonesia. Dengan demikian pelayanan konseling di Indonesia dikembangkan dan dilaksanakan dengan paradigma konseling adalah *pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam budaya Indonesia*. Konseling memiliki bidang singgung antara psikologi, pendidikan, dan budaya, terutama berkenaan dengan segi isi dan muatan nilai yang perlu diperhatikan. Dengan paradigma ini para pelaksana konseling perlu menguasai berbagai materi psikologi (psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi pendidikan, psikologi sosial), materi pendidikan (dasar-dasar pendidikan, kurikulum pendidikan, belajar dan pembelajaran, penilaian pendidikan, pengelolaan pendidikan), serta materi budaya dan konseling lintas budaya.

Materi psiko-pendidikan “dikemas” dalam ilmu dan teknologi konseling dengan warna budaya Indonesia. Bidang konseling yang perlu dikuasai

meliputi (1) dasar-dasar keilmuan konseling (pengertian, tujuan, fungsi, asas, prinsip, dan landasan konseling); (2) bidang konseling (pribadi, sosial, belajar, dan karir); (3) jenis-jenis layanan (orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mediasi, dan konsultasi); (4) kegiatan pendukung : aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus); dan (5) profesionalisasi konseling.

Konselor baik di sekolah maupun di luar sekolah, harus memahami bahwa pelayanan konseling yang diselenggarakannya memiliki muatan unsure yang bersifat psikologi, pendidikan, dan budaya. Ketiganya terpadukan dalam kegiatan konseling. Apabila salah satu atau lebih unsur-unsur itu terabaikan, maka kegiatan konseling kehilangan jati dirinya sebagai pelayanan konseling yang cocok di Indonesia.

Konseling sangat dekat dengan psikologi, bahkan sebagian besar muatan konseling sebagai suatu ilmu bersumber dari psikologi. Psikologi sebagai ilmu pendukung yang paling pokok dalam konseling, bantuan yang demikian disebut bantuan psikologi. Psikologi dalam konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku dan perkembangan individu menjadi sasaran layanan (individu atau klien). Ini sangat penting karena bidang garapan konseling adalah tingkah laku dan perkembangan individu, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan secara optimal. Setiap individu yang berkembang harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangan itu apabila ia hendak dikatakan sebagai individu yang bahagia dan sukses.

Selain itu konseling didukung ilmu pendidikan karena individu yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar, dan kegiatan tersebut bersifat normative, obyektif, dan berorientasi pemecahan masalah. Bersifat

normative, yaitu dengan sengaja membantu individu berkembang ke arah baik dan benar yang diwujudkan dalam perubahan perilaku. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normative memiliki landasan-landasan ilmiah dan menggunakan metode-metode ilmiah di dalam mewujudkan fungsi keilmuannya, yaitu fungsi mempelajari dan membawa individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bersifat obyektif yaitu mempelajari apa adanya tentang individu sebagai suatu organisme yang sedang berkembang dan berbagai factor yang terkait dengan perkembangannya. Berorientasi pemecahan masalah baik dalam tataran obyektif (dalam proses mempelajari) maupun dalam tataran normative (dalam proses membawa). Orientasi masalah dalam tataran obyektif terfokus kepada persoalan apa dan mengapa individu berada dalam kondisi demikian, dan orientasi masalah pada tataran normative terkait dengan bagaimana mengembangkan, mengubah, dan memperbaiki kondisi tersebut. Pelayanan konseling harus didasarkan norma-norma yang berlaku, baik isinya, prosesnya, tekniknya, maupun instrumentasinya yang dipergunakannya. Pelayanan yang tidak normative bukanlah pelayanan konseling. Konseling yang dimaksud disini merupakan pelayanan bantuan yang berakar pada budaya kita, dan mempunyai landasan ilmiah psikologi dan pendidikan.

C. Latihan

1. Diskusikan dengan teman Anda dalam kelompok tentang penerapan teori pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling!
2. Diskusikan dengan teman Anda tentang makna pendidikan dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling.
3. Diskusikan dengan teman Anda kedudukan konseling dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah!

4. Jelaskan hakikat pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia.
5. jelaskan hakikat pendidikan sebagai upaya pengembangan kemampuan manusia.

D. Rangkuman

Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan, sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkretnya (nyatanya). Praksis pendidikan adalah bidang kehidupan dan kegiatan praktis pendidikan. Kedua jenis seyogyanya tidak dipisahkan, sebaiknya siapa yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perlu menguasai keduanya. Teori mengandaikan praktek dan praktek berlandaskan teori.

Pendidikan dipandang bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju tingkat kedewasaannya. Pendidikan tidak dipandang hanya sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan.

Konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu yang sedang dalam proses perkembangan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Hakikat pendidikan sebagai pembangunan nasional, pemberdayaan dan pembudayaan manusia, upaya pengembangan kemampuan manusia, dan sebagai investasi sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya,

pendidikan yang tuntas tidak hanya didasarkan pada pelayanan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan layanan pelatihan yang dilakukan oleh guru praktik, tapi juga pada pelayanan *konseling* yang dilakukan oleh *konselor* sekolah.

Melalui layanan konseling, konselor akan membantu terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengatasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.

E. Evaluasi

Tugas Anda menjawab pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar dari empat alternatif jawaban yang disediakan.

1. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang :
 - a. makna dan bagaimana pendidikan dilaksanakan
 - b. hakikat dan bagaimana pendidikan direncanakan
 - c. pelaksanaan dan evaluasi pendidikan
 - d. hakikat dan bagaimana pendidikan dilaksanakan

2. Praksis pendidikan adalah:
 - a. pelaksanaan pendidikan secara kronkrit
 - b. bidang kehidupan dan kegiatan praktik pendidikan
 - c. perancangan pendidikan dan praktik pendidikan
 - d. evaluasi program pendidikan

3. Pendidikan harus dipandang sebagai sarana untuk:
 - a. memperoleh penghasilan yang tinggi
 - b. memperoleh kedudukan yang tinggi
 - c. persiapan kehidupan yang akan datang
 - d. kehidupan sekarang

4. Melalui pendidikan manusia akan menemukan eksistensinya, ini berarti bahwa eksistensi manusia adalah :
 - a. eksistensi kemanusiaan
 - b. eksistensi ekonomis
 - c. eksistensi kecerdasan
 - d. eksistensi sosio-budaya

5. Pendidikan sebagai proses interaksi, ini berarti bahwa dalam pendidikan akan selalu berhadapan dengan:
 - a. materi pendidikan yang direncanakan
 - b. sarana dan prasarana pendidikan
 - c. peserta didik yang sedang belajar
 - d. kepribadian manusia yang sedang berkembang

6. Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang mementingkan:
 - a. pemenuhan kebutuhan peserta didik
 - b. pemenuhan kebutuhan konselor
 - c. pemenuhan kebutuhan kepala sekolah
 - d. pemenuhan kebutuhan orang tua

7. Konselor dinyatakan sebagai bagian dari unsur pendidik tertguang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada:
- a. Pasal 1 butir 3
 - b. Pasal 1 butir 6
 - c. Pasal 3 ayat (2)
 - d. Pasal 2 ayat (1)

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan soal evaluasi akhir bab ini, Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia untuk setiap bab dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN DAN PROSES PEMBELAJARAN
DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Indikator Keberhasilan

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat:

1. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling
2. Mengimplementasikan proses pembelajaran dan pelayanan bimbingan dan konseling

B. Uraian Materi

1. Prinsip-prinsip Pendidikan dalam BK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa:

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Lebih lanjut, fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Pasal 3 *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.*

Berdasarkan pengertian, fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, tampak bahwa pendidikan tidak saja membawa peserta didik sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, tetapi juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menegaskan bahwa fungsi pendidikan adalah pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa nilai-nilai kehidupan mewarnai sikap dan tindakan individu. Di samping itu, nilai kehidupan juga erat kaitannya dengan perhatian akan hidup serta kebudayaan. Oleh sebab itu, pendidikan harus membantu peserta didik untuk mengalami nilai-nilai kehidupan dan menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidup mereka.

Peserta didik sebagai subyek pendidikan harus dikembangkan menjadi insan Indonesia cerdas secara komprehensif, yang meliputi (1) cerdas spiritual, (2) cerdas emosional, (3) cerdas sosial, (4) cerdas intelektual, dan (5) cerdas kinestetik. yang diuraikan sebagai berikut:

- a. **Cerdas spiritual**, yaitu kecerdasan diri yang ditunjukkan melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
- b. **Cerdas emosional**, yaitu kecerdasan diri yang ditunjukkan melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.

- c. **Cerdas sosial**, yaitu kecerdasan diri yang ditunjukkan melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik; demokratis; empatik dan simpatik; menjunjung tinggi hak asasi manusia; ceria dan percaya diri; menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.
- d. **Cerdas intelektual**, yaitu kecerdasan diri yang ditunjukkan melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif.
- e. **Cerdas kinestetis**, yaitu kecerdasan diri yang ditunjukkan melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil dan trengginas, serta aktualisasi insan adiguna.

Melalui pendidikan diharapkan akan dapat diwujudkan insan Indonesia yang kompetitif, yaitu insan yang berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat (Renstra Depdiknas 2005-2009).

Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif. Pendidikan juga bertugas menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Hal ini sangat penting, karena dengan kemandirian peserta didik dapat bertahan dalam menghadapi pasar bebas. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi

bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sasaran umum pendidikan yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sasaran umum pendidikan juga menjadi sasaran di dalam kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor yang bekerja dalam berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- c. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Nilai dasar pendidikan dilaksanakan dengan wawasan filosofi kebijaksanaan sosial (*social policy*) artinya setiap orang memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-masing. Pengakuan

otoritas masing-masing dalam bidang dan tingkat kesenangan masing-masing tersebut merupakan salah satu ciri penting masyarakat beradab. Masyarakat yang demikian akan dapat melakukan tukar menukar informasi, berdialog maupun berdiskusi tentang kepentingan umum sehingga hak asasi masing-masing menjadi kesadaran tunggal masyarakat beradab.

Pendidikan juga memiliki nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia itu sendiri, nilai-nilai dasar inilah yang dijadikan prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini terdapat sepuluh nilai dasar pendidikan yang merupakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu ketuhanan, kemerdekaan, kebangsaan, keseimbangan, kebudayaan, kemandirian, kemanusiaan, kekeluargaan, kesportifan dan kebanggaan.

Secara lebih rinci 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pendidikan dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, ke-Tuhanan. Sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya, maka pendidikan hendaknya mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga secara batiniah terdapat hubungannya vertikal yang harmonis pada setiap manusia dengan Tuhannya, dan secara lahiriah terjadi hubungan horizontal antar-manusia yang penuh dengan suasana kesejukan, ketenteraman dan kearifan yang didasarkan pada rasa keamanan dan ketakwaan tersebut. Hubungan antar manusia dengan Tuhannya menjadi landasan untuk berkarya dan beraktivitas.

Kedua, kemerdekaan. Pelaksanaan pendidikan bangsa harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan azasi; dengan demikian perkembangan

ide, pemikiran dan kreativitas tidak dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya pragmatis. Dari Yang Maha Esa setiap manusia itu diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan diri dari ikatan-ikatan 'natur' menuju tercapainya tingkatan 'cultuur'. Kemerdekaan untuk mengembangkan diri itulah hakikat pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan itu tidak dapat dibatasi oleh tirani kekuasaan, politik atau kepentingan tertentu. Nilai dasar kemerdekaan inilah yang menjadi landasan pengembangan semangat demokrasi peserta didik.

Ketiga, kebangsaan. Secara fundamental pendidikan itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan yang hakiki. Realitas tentang terdapatnya perbedaan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya, hendaknya justru menjadi kerangka dasar dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dengan demikian tujuan pendidikan hendaknya bias memajukan bangsa secara keseluruhan yang didalamnya terdapat berbagai perbedaan itu, dan implikasi didalam penyelenggaraan itu sendiri tidak boleh membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya.

Keempat, keseimbangan. Pendidikan hendaknya sanggup memberikan keseimbangan di dalam upaya memajukan berkembangnya kecerdasan dan kepribadian serta bertumbuhnya tubuh peserta didik. Pendidikan yang hanya mengedepankan berkembangnya kecerdasan akan menghasilkan manusia yang tidak sehat jiwa raganya. Pendidikan yang hanya mengedepankan berkembangnya kepribadian hanya menghasilkan manusia yang tertinggal. Sedangkan pendidikan yang hanya mengedepankan bertumbuhnya tubuh menghasilkan manusia yang tidak berbobot kecerdasan dan kepribadianya. Disinilah keseimbangan diperlukan.

Kelima, kebudayaan. Kebudayaan bangsa merupakan 'roh' pendidikan nasional. Pendidikan harus selalu diselaraskan pada kebudayaan bangsa itu sendiri, meskipun tidak berarti harus menolak budaya bangsa lain yang datang. Untuk terpadu dengan budaya bangsa lain dapat diterapkan "Konsep Trikon", yaitu kontinuitas, konsentrisitas dan konverginitas. Maknanya mengembangkan budaya luhur bangsa sendiri dan menyeleksi datangnya budaya bangsa lain dengan memberi kemungkinan terpadunya budaya bangsa dan budaya bangsa lain menuju terbentuknya budaya baru yang lebih baik.

Keenam, kemandirian. Kemandirian menjadi dasar bagi segala bentuk usaha dalam pencapaian kemajuan hidup. Kemandirian juga merupakan landasan bagi bangsa Indonesia guna bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tanpa kemandirian, usaha pencapaian kemajuan hidup sulit membuahkan hasil optimal. Tanpa kemandirian sulit bagi bangsa kita untuk mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain. Sudah barang tentu kemandirian ini dalam pelaksanaannya tidak harus dilalui dengan meniadakan kerja sama dengan kelompok lain karena dalam banyak hal kerja sama itu merupakan kata kunci keberhasilan.

Ketujuh, kemanusiaan. Pendidikan harus diselenggarakan di atas nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, kesopanan, kesatuan, dan sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan dapat membuahkan keluhuran budi pekerti bagi peserta didik. Setiap peserta didik hendaknya berbudi pekerti luhur setelah mengalami proses pendidikan di tingkat manapun. Budi pekerti merupakan modal utama mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat. Tanpa modal budi pekerti yang luhur maka kehadirannya di masyarakat tidak membawa manfaat, kecuali membawa 'azab'.

Kedelapan, kekeluargaan. Sebuah keluarga yang harmonis memiliki nilai-nilai ideal untuk menyelenggarakan pendidikan. Implikasinya

penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan yang dalam hal ini ditandai dengan akrabnya hubungan antara sesama pendidik, sesama peserta didik, dan antara pendidik dengan peserta didik sebagaimana akrabnya hubungan antar sesama anggota dalam suatu keluarga. Pendekatan ini disebut dengan 'Sistem Among' yang dapat memberikan porsi seimbang di antara pendekatan organisatoris dengan pendekatan organis dalam melaksanakan sistem pendidikannya.

Kesembilan, kesportifan. Pendidikan harus mampu menumbuhkan jiwa dan semangat sportivitas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sportif, bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang sportif. Sportifitas merupakan perpaduan yang harmonis antar unsur-unsur disiplin, tanggung jawab dan prestasi. Dengan memadukan ketiga unsur inilah bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan berbudaya. Pendidikan, dengan demikian dituntut menanamkan jiwa dan semangat sportifitas kepada seluruh anggota bangsa.

Kesepuluh, kebanggaan. Pendidikan hendaknya mampu membangkitkan kebangkitan rasa dan keyakinan pada peserta didik untuk senantiasa mencintai tanah air dan menghargai bangsa. Pendidikan harus mampu mengikis sifat-sifat inferioritas instrinsik dalam jiwa peserta didik, sebaliknya harus mampu menumbuhkan sifat-sifat superioritas instrinsik yang dapat membangkitkan rasa bangga terhadap diri sendiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dasar tersebut harus secara simultan diakomodasikan dalam pengembangan substansi pendidikan, struktur kesempatan dan manajemen penyelenggaraan, serta metodologi proses pendidikan. Nilai-nilai dasar pendidikan berkaitan langsung dengan keberhasilan pendidikan

yaitu peserta didik yang cerdas, berkepribadian luhur, dan bertubuh sehat, target keberhasilan pendidikan adalah terwujudnya anak yang beradab.

2. *Proses Pembelajaran dalam Bimbingan dan Konseling*

Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif. Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian sangat penting untuk dapat bertahan dalam menghadapi pasar bebas. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sasaran umum pendidikan yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sasaran umum pendidikan juga menjadi sasaran di dalam kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor yang bekerja dalam berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Pendidikan harus dilakukan oleh pendidik sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6 menyatakan bahwa:

”Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Ketetapan konselor sebagai tenaga pendidik membawa konsekuensi bahwa konselor wajib memenuhi persyaratan profesional sebagai pendidik sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pada ayat (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkatan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang pendidik, termasuk konselor wajib memahami dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya pengertian dan batasan pendidikan yang menjadi wilayah kerja profesionalnya, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 1, yaitu ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Semua tenaga profesional pendidik diwajibkan memenuhi persyaratan dan melaksanakan fungsi dan tugas profesional dalam wilayah pendidikan dalam pengertian dan batasan yang amat luas itu, sesuai dengan setting penugasannya. Pada setting sekolah, bertugas dua jenis pendidik, yaitu guru (pengampu bidang studi atau mata pelajaran) dan konselor

(pengampu pelayanan konseling). Meskipun kedua tenaga profesional itu bekerja pada wilayah kerja yang sama, yaitu wilayah pendidikan, lebih khusus lagi pada setting sekolah, keduanya menangani bidang kegiatan yang berbeda, yaitu (1) Guru, menyelenggarakan proses pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan tertentu; dan (2) Konselor, menyelenggarakan proses pembelajaran melalui kegiatan pelayanan konseling dalam bidang pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kemampuan belajar, dan pengembangan karir pada satuan pendidikan.

Kualifikasi dan kompetensi pendidik harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Kualifikasi dan kompetensi Guru dan Konselor telah dikembangkan standarnya oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Guru telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sedangkan konselor telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik secara bertahap harus dipenuhi dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 94 butir c dinyatakan Standar kualifikasi pendidik berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Ini berarti bahwa pada tahun 2020 tenaga pendidik di Indonesia harus sudah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan, sehingga pendidikan bermutu akan segera diwujudkan.

Konselor sebagai pendidik profesional akan melakukan konseling sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan.

Upaya konseling adalah membantu individu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kinestetik, sehingga akan dapat diwujudkannya manusia yang berhasil sebagai pribadi mandiri (mahluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (mahluk sosial), dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (mahluk Tuhan). Konseling merupakan proses yang menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah, karena program-program konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya menyangkut kawasan kematangan pendidikan dan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial. Hasil konseling pada kawasan ini menunjang keberhasilan pendidikan umumnya.

Konselor dalam merencanakan konseling harus mengacu kepada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, beramal dan berahlak mulia, yang memiliki

keunggulan komparatif dan dan kompetitif di era global. Keunggulan itu dapat dicapai melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta keterampilan hidup yang bermartabat. Oleh karena itu perencanaan program konseling harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan, kebutuhan, dan masalah peserta didik, strategi layanan, dan personal. Perencanaan program harus diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik, ini merupakan tahap awal dan menjadi titik tolak dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Program yang direncanakan harus bersifat komprehensif dan memperhatikan kontinuitas tahap-tahap perkembangan sejak dari pendidikan di TK sampai SLTA (atau perguruan tinggi).

Target intervensi konseling adalah semua peserta didik yang ada di sekolah yang bersifat pencegahan dan pengatasan masalah, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Oleh karena itu pelayanan konseling merupakan usaha membantu individu mencari dan menetapkan pilihan serta mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, perencanaan dan pengembangan karir, kehidupan berkeluarga, serta kehidupan keberagamaan. Pelayanan konseling didasarkan atas hakikat konseling sebagai filsafat, komitmen, pandangan hidup, sikap, tindakan dan pandangan mendunia yang mewarnai komitmen tenaga profesi konseling atas pekerjaannya dan mendukung upaya-upaya pendidikan bermutu di sekolah.

Proses pembelajaran dalam bimbingan dan konseling mencakup bidang pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan

karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Pengembangan kehidupan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan, dan advokasi.

Fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungan.

Fungsi pencegahan, yaitu membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.

Fungsi pengentasan, yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkembangkan berbagai potensi dan kondisi kondusif positif yang dimilikinya.

Fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh Guru BK atau konselor melalui berbagai jenis layanan, yang terdiri dari 9 jenis layanan, yaitu:

- a. layanan orientasi,
- b. layanan informasi,
- c. layanan penempatan dan penyaluran,
- d. layanan penguasaan konten,
- e. layanan konseling perorangan,
- f. layanan bimbingan kelompok,
- g. layanan konseling kelompok,
- h. layanan konsultasi, dan
- i. layanan mediasi.

Standar operasional prosedur Guru BK atau konselor dalam melaksanakan pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan layanan yang diorientasikan pada kebutuhan sasaran layanan;
- b. menyiapkan/mengorganisasikan kondisi sasaran dan sarana penyelenggaraan layanan;
- c. melaksanakan layanan sesuai dengan perencanaan;
- d. melakukan penilaian, meliputi penilaian hasil dan penilaian proses pelayanan; dan
- e. melakukan tindak lanjut, sesuai dengan hasil penilaian.

Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling harus dapat diciptakan suasana kewibawaan antar guru BK atau konselor dengan peserta didik, yang tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan

dan melekatkan hubungan guru BK atau konselor dengan peserta didik, yang meliputi:

- a. pengakuan dan penerimaan,
- b. kasih sayang dan kelembutan,
- c. penguatan,
- d. tindakan tegas yang mendidik, serta
- e. pengarahan dan keteladanan.

Kewibawaan guru BK atau konselor yang tidak didasarkan pada status, dan/atau kekuasaan, melainkan mengacu sepenuhnya kepada nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang di dalam kaidah-kaidah harkat dan martabat manusia. Itu membuat hubungan antara peserta didik dengan guru BK atau konselor menjadi dekat, hangat, nyaman, terbuka, serta diwarnai oleh berbagai kualitas positif lainnya yang memperkembangkan peserta didik sebagai sasaran layanan.

Suasana kewibawaan terjadi saling menghargai, saling membesarkan dan saling meninggikan antara sasaran layana (peserta didik) dengan guru BK atau konselor, semua berdasarkan harkat dan martabat manusia. Guru BK atau konselor dalam segenap pandangan, sikap dan perbuatan, dan perlakuannya harus dirasakan oleh peserta didik sebagai sasaran layanan benar-benar membesarkan dan meninggikan harkat dan martabatnya. Tindakan tegas yang mendidik dalam upaya membantu peserta didik mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui pelayanan bimbingan dan konseling dan dirasakan oleh peserta didik sesuatu yang hangat, nyaman, dinamis, dan merangsang untuk memahami permasalahan dan bagaimana seharusnya diperbuat sehingga tujuan dapat tercapai.

Pemahaman, pengakuan dan penerimaan guru BK atau konselor terhadap peserta didik sebagai sasaran layanan menjadi modal hubungan antara keduanya. Guru BK atau konselor mengawali hubungan itu dengan

sepenuhnya menerima apa adanya, tanpa adanya penilaian atau memberi cap pada diri peserta didik.

Hubungan yang diawali dan didasari oleh kebaikan kemanusiaan itu, selanjutnya diwarnai secara kental oleh suasana kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang dan kelembutan bukan kelemahan, melainkan kekuatan dalam menjalin kesejukan hati, kejernihan pikiran, dan kenyamanan perasaan, yang semuanya merupakan warna lapangan kehidupan bersama antara peserta didik dan guru BK atau konselor.

Suasana hubungan yang sejuk, jernih dan nyaman itu dihiasi pula dengan bunga-bunga keceriaan yang menggembirakan dengan diberikan senyuman, pujian, hadiah, dan bentuk lainnya, besar atau kecil terhadap kesuksesan atau kemajuan, perilaku positif yang menggembirakan

C. Latihan

1. Diskusikan dengan teman Anda ,tentang implementasi prinsip-prinsip pendidikan dalam bimbingan dan konseling.
2. Diskusikan dengan teman Anda tentang bagaimana proses pembelajaran dalam bimbingan dan konseling dilaksanakan.!
3. Diskusikan dengan teman Anda bahwa proses pembelajaran dalam bimbingan dan konseling harus diwujudkan oleh guru Bk atau konselor melalui suasana kewibawaan!

D. Rangkuman

Pendidikan juga memiliki nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia itu sendiri, nilai-nilai dasar inilah yang dijadikan prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini

terdapat sepuluh nilai dasar pendidikan yang merupakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu ketuhanan, kemerdekaan, kebangsaan, keseimbangan, kebudayaan, kemandirian, kemanusiaan, kekeluargaan, kesportifan dan kebanggaan. Nilai-nilai dasar tersebut harus secara simultan diakomodasikan dalam pengembangan substansi pendidikan, struktur kesempatan dan manajemen penyelenggaraan, serta metodologi proses pendidikan. Nilai-nilai dasar pendidikan berkaitan langsung dengan keberhasilan pendidikan yaitu peserta didik yang cerdas, berkepribadian luhur, dan bertubuh sehat bias diwujudkan. Target keberhasilan pendidikan yaitu anak yang beradab bias diwujudkan.

Proses pembelajaran dalam bimbingan dan konseling mencakup bidang pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kehidupan sosial, pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir.

Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh Guru BK atau konselor melalui berbagai jenis layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi

Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling harus dapat diciptakan suasana kewibawaan yang meliputi pengakuan dan penerimaan, kasih sayang dan kelembutan, penguatan, tindakan tegas yang mendidik, serta pengarahan dan keteladanan guru BK atau konselor terhadap peserta didik akan mendekatkan dan melekatkan hubungan guru BK atau konselor dengan peserta didik. Kewibawaan guru BK atau konselor yang tidak didasarkan pada status, dan/atau kekuasaan, melainkan mengacu sepenuhnya kepada nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang di dalam kaidah-kaidah harkat dan martabat manusia. Itu membuat hubungan antara peserta didik dengan guru BK atau konselor

menjadi dekat, hangat, nyaman, terbuka, serta diwarnai oleh berbagai kualitas positif lainnya yang memperkembangkan peserta didik sebagai sasaran layanan.

E. Evaluasi

Tugas Anda menjawab pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih salah satu jawaban yang benar dari empat alternatif jawaban yang disediakan

1. Pendidikan hendaknya dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan, hal ini sesuai dengan prinsip :
 - a. Kebangsaan
 - b. Kemerdekaan
 - c. keTuhanan
 - d. kebudayaan
2. Pendidikan hendaknya dapat membangkitkan rasa dan keyakinan mencitai tanah air dan bangsa, hal ini sesuai dengan prinsip:
 - a. kebudayaan
 - b. kebanggaan
 - c. kemandirian
 - d. kekeluargaan
3. Pendidikan harus diselaraskan dengan budaya bangsa Indonesia, hal ini sesuai dengan prinsip:
 - a. Kemerdekaan
 - b. Kebudayaan
 - c. Kebangsaan
 - d. Keseimbangan

4. Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling harus dapat menciptakan suasana kewibawaan, yaitu:
 - a. kasih sayang dan bimbingan
 - b. pengakuan dan pembiaran
 - c. keteladanan dan hukuman
 - d. penguatan dan tindakan tegas yang mendidik

5. Proses pembelajaran melalui bimbingan dan konseling mencakup bidang kehidupan:
 - a. pribadi dan sosial
 - b. kemanusiaan dan kekeluargaan
 - c. karir dan kerjasama
 - d. sosial dan politik

6. Proses pembelajaran melalui pelayanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan masa depan peserta didik, adalah cakupan dari bidang bimbingan dan konseling:
 - a. belajar
 - b. sosial
 - c. karir
 - d. pribadi

7. Proses pembelajaran melalui kegiatan pelayanan bimbingan kelompok tepat untuk mewujudkan fungsi:
 - a. Pencegahan dan pemahaman
 - b. Pemahaman dan pengentasan masalah
 - c. Advokasi dan pengentasan masalah
 - d. Pengentasan masalah pencegahan

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan soal evaluasi akhir bab ini, Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia untuk setiap bab dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

Evaluasi kegiatan belajar dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Evaluasi kegiatan belajar mencakup evaluasi proses dan hasil belajar. Evaluasi proses mencakup keaktifan, keterlibatan, antusiasisme peserta dalam kegiatan belajar dan evaluasi hasil mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki peserta setelah kegiatan belajar berlangsung.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan seluruh soal evaluasi pada modul ini (akhir bab materi pokok), Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

KUNCI JAWABAN

BAB I

1. a.
2. b
3. c
4. a
5. d
6. a
7. b

BAB II

1. c
2. b
3. b
4. d
5. a
6. c
7. b

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004). ***Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru***. Bandung: Ganesindo.
- Chapman, David W., dkk (editor) (1997). ***From Planning to Action: Government Initiative for Improving School-Level Practice***. UNESCO
- Conny R. Semiawan (1999). ***Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin***. Jakarta: Grasindo
- Dahlan, M.D (1998). ***Posisi Bimbingan dan Penyuluhan Pendidikan dalam Kerangka Ilmu Pendidikan***. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FIP-IKIP Bandung.
- Delors, Jacques (Editor) (1998). ***Education for the Twenty-First Century: Issues and Prospects***. Paris: UNESCO Publishing.
- Depdiknas. (2003). ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional***. Jakarta: Depdiknas
- Frankl, Victor E. (1985). ***Man's Search for Meaning***. Pocket Book, New York: Washington Square Press.
- H.A.R Tilaar (2002). ***Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru***. Jakarta: Grasindo.
- Havighurst, R.J (1961). ***Human development and Education***. New York: Longmans, Green & Co.
- Ki Hajar Dewantara (1959). ***Demokrasi dan Leideschap***. Yogyakarta: majelis Luhur Taman Siswa.
- Levinger, B. (1996). ***Critical Transitions: Human Capacity Development Across the Lifespan***. New York: Education Development Center, Inc.
- Mungin Eddy Wibowo (2001). ***Model Konseling Kelompok di Sekolah Menengah Umum***. Disertasi. Bandung: program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Mungin Eddy Wibowo (2002). ***Konseling Perkembangan: Paradigma Baru dan Relevansinya di Indonesia***. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Semarang: Depdiknas UNNES
- Prayitno (2009). ***Dasar Teori dan Praksis Pendidikan***. Jakarta: Grasindo.
- Prosser, H.M. (1978). ***The Cultural Dialogue: An Introduction to Intercultural Communication***. Boston: Houghton Mifflin.
- Rochman Natawidjaya (1978). ***Pendidikan Nasional***. Jakarta: Depdikbud
- Rousseau, J.J. (1950). ***Emile ou De l'Education. Trans. Foxley, B. Emile or Education***. London: Everyman's Library.
- Sunaryo Kartadinata (2011). ***Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Pedagogis***. Bandung: UPI Press.
- Titus, Harold H. (1959). ***Living Issues in Philosophy***. New York: American Book Co.
- Zohar, Danah & Marshall, Ian (2000). ***Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence***. London: Bloomsbury Publ. Plc.